



KATALOG BPS : 4102004.52

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 2012



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

KATALOG DALAM TERBITAN
CATALOGUE IN PUBLICATION

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
WELFARE INDICATORS OF NUSA TENGGARA BARAT PROVINCE
2012

KATALOG BPS BPS CATALOGUE	: 4102004.52
I S B N	: 979-599-605. 3
NOMOR PUBLIKASI PUBLICATION NUMBER	: 52520.1304
UKURAN BUKU BOOK SIZE	: 28 X 21 cm
JUMLAH HALAMAN TOTAL PAGES	: 61
NASKAH MANUSCRIPT	: SEKSI STAT. KESEJAHTERAAN RAKYAT WELFARE STATISTICS SECTION
GAMBAR KULIT ART DESIGN	: BIDANG STATISTIK SOSIAL SOCIAL STATISTICS DIVISION
DITERBITKAN OLEH PUBLISHED BY	: BPS PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT BPS – NUSA TENGGARA BARAT PROVINCE
DICETAK OLEH PRINTED BY	: CV. Maharani

BOLEH DIKUTIP DENGAN MENYEBUT SUMBERNYA
MAY CITED WITH MENTIONING THE SOURCE

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat telah dapat menyelesaikan publikasi **“Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2012”**.

Sumber data yang dipergunakan dalam publikasi ini adalah data dari hasil Sensus Penduduk, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) dan data dari instansi terkait. Publikasi ini bertujuan untuk menggambarkan perkembangan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Barat yang realistis.

Publikasi ini memberikan gambaran kesejahteraan rakyat secara maksimal dengan beberapa indikator pada masing-masing bidang pembangunan yang dapat memperlihatkan kondisi kesejahteraan rakyat. Bidang pembangunan yang dimaksud, adalah kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, penduduk miskin dan pola konsumsi serta perumahan dan lingkungan.

Dari indikator-indikator pada masing-masing bidang pembangunan tersebut diharapkan dapat dipergunakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih bagi terbitnya publikasi ini disampaikan terima kasih.

Mataram, Oktober 2013

**BADAN PUSAT STATITIK
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
K e p a l a,**



Drs WAHYUDIN, MM
NIP: 196612311991031140

DAFTAR ISI

	Halaman
Katalog Dalam Terbitan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Ruang Lingkup.....	1
1.2. Sistematika	2
1.3. Sumber Data.....	3
1.3.1. Sensus Penduduk.....	3
1.3.2. Survei Sosial Ekonomi Nasional.....	3
1.3.3. Sumber Data Lain.....	4
II. KEPENDUDUKAN.....	5
2.1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk.....	5
2.2. Persebaran dan Kepadatan Penduduk.....	8
2.3. Struktur Umur	11
2.4. Rasio Jenis Kelamin.....	13
2.5. Angka Beban Tanggungan.....	14
2.6. Rata-rata Umur Perkawinan Pertama.....	16
III. KESEHATAN DAN GIZI.....	17
3.1. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan.....	17
3.2. Status Kesehatan.....	18
3.2.1. Keluhan Kesehatan dan Angka Kesakitan.....	18
3.2.2. Rata-rata Lama Sakit.....	20
3.2.3. Cara Pengobatan.....	21
3.2.4. Penolong Kelahiran Balita Pertama.....	24
IV. PENDIDIKAN	25

4.1.	Ketersediaan Fasilitas Pendidikan.....	25
4.2.	Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan.....	27
4.3.	Partisipasi Sekolah.....	28
4.4.	Melek Huruf.....	31
V.	KETENAGAKERJAAN.....	33
5.1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.....	33
5.2.	Lapangan Pekerjaan dan Status Pekerjaan.....	37
5.3.	Jam Kerja.....	38
VI.	PENDUDUK MISKIN DAN POLA KONSUMSI	39
6.1.	Penduduk Miskin.....	40
6.2.	Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi NTB 2010-2012....	41
6.3.	Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi NTB 2010-2012....	44
VII.	PERUMAHAN	46
7.1	Status Penguasaan Tempat Tinggal.....	46
7.2.	Kualitas Tempat Tinggal	48
7.3.	Fasilitas Tempat Tinggal	52

I. PENDAHULUAN

1.1. Ruang Lingkup

Tujuan Pembangunan pada dasarnya diintensifkan untuk kesejahteraan rakyat. Berbagai program pembangunan telah dilakukan oleh pemerintah, baik di bidang Pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan, dan sebagainya. Hasil pembangunan diharapkan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun diakui, bahwa keragaman budaya, adat istiadat, sumber daya, luas wilayah, serta potensi alam yang ada mengakibatkan beragamnya pula pencapaian hasil-hasil pembangunan antarwilayah.

Monitoring terhadap hasil pembangunan mutlak diperlukan untuk melihat sejauh mana pembangunan yang telah dilaksanakan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, sehingga program pembangunan berikutnya dapat lebih dioptimalkan. Untuk melakukan monitoring keberhasilan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat diperlukan suatu alat ukur baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Adapun alat-alat ukur yang sering dipergunakan untuk mendiskripsikan keadaan kesejahteraan masyarakat, yaitu Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra). Indikator kesejahteraan rakyat merupakan resorsis atau dampak dalam arti Inkesra tersebut mengilustrasikan pengaruh atau dampak langsung dari pembangunan.

Untuk menyajikan data statistik yang mampu mencakup semua segi kesejahteraan rakyat secara lengkap sulit dilakukan, karena tidak semua aspek kesejahteraan dalam pengertian luas seperti didiskusikan di atas, dapat diukur secara statistik. Indikator yang disajikan dalam terbitan ini hanya menyangkut segi-segi kesejahteraan yang dapat diukur. Lain halnya dengan statistik ekonomi yang pengumpulan datanya relatif lebih mudah, lebih sering dan lebih teratur. Sedangkan statistik sosial yang merupakan komponen penyusunan Inkesra relatif lebih sukar, lebih jarang dan kurang teratur pengumpulan datanya di lapangan.

Disamping itu, Inkesra ini juga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap pembangunan manusia yang telah dilaksanakan. Titik-titik lemah pembangunan yang pernah dilakukan akan tampak dari indikator-indikator tersebut, sehingga dapat dilakukan perbaikan untuk pelaksanaan di masa depan. Selain itu, keunggulan pembangunan NTB juga akan tampak pada publikasi ini.

1.2. Sistematika

Indikator Kesejahteraan Rakyat 2012 dalam penyajiannya terdiri atas enam kelompok indikator yaitu :

1. Kependudukan
2. Kesehatan dan Gizi
3. Pendidikan
4. Ketenagakerjaan
5. Kemiskinan dan Pola Konsumsi
6. Perumahan dan Lingkungan

Penduduk mencerminkan sasaran dari kesejahteraan yang sedang diamati dan sebagai dasar perhitungan indikator lainnya. BAB I, membahas ruang lingkup, sistematika publikasi dan sumber data indikator kesejahteraan rakyat. BAB II, Kependudukan ini menggambarkan laju pertumbuhan penduduk, persebaran dan kepadatan penduduk, struktur umur dan rasio jenis kelamin (sex ratio), angka beban tanggungan dan rata-rata umur perkawinan pertama. BAB III, menyajikan indikator kesehatan dan gizi merupakan indikator penting di dalam menggambarkan tingkat kesehatan dan gizi masyarakat. Indikator yang dicakup meliputi ketersediaan fasilitas kesehatan, derajat kesehatan, status kesehatan, status gizi balita dan perempuan usia subur, pemanfaatan fasilitas kesehatan. BAB IV, menyajikan indikator pendidikan yang bertujuan untuk menggambarkan ketersediaan fasilitas pendidikan, tingkat pendidikan, partisipasi sekolah dan putus sekolah. BAB V menyajikan indikator ketenagakerjaan. Indikator ini menggambarkan tingkat partisipasi angkatan kerja dan kesempatan kerja, lapangan dan status pekerjaan, jam kerja, upah/gaji dan pekerja anak. Kemiskinan dan pola konsumsi disajikan dalam BAB VI. Kemudian pada BAB VII menyajikan perumahan dan lingkungan. Bab ini menggambarkan kualitas rumah tinggal, fasilitas lingkungan perumahan dan kebersihan lingkungan.

1.3. Sumber Data

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2012 ini menyajikan informasi dalam bentuk tabel dan grafik, yang dimaksudkan agar gambaran keadaan dan perkembangan kesejahteraan rakyat dengan mudah dapat dipahami. Untuk mengetahui gambaran serta latar belakang dari berbagai sumber data yang dipergunakan, di bawah ini diuraikan beberapa sumber data utama serta kegiatan pengumpulan datanya.

1.3.1. Sensus Penduduk

Di Indonesia data sensus penduduk merupakan tumpuan harapan dan menjadi tonggak atau dasar berpijak utama dalam mengukur parameter kependudukan, yaitu fertilitas, mortalitas dan migrasi. Sensus Penduduk di Indonesia pertama kali dilakukan pada tahun 1930. Setelah Indonesia merdeka, sensus penduduk telah dilaksanakan sebanyak enam kali, yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000 dan 2012.

Sensus Penduduk diadakan pada tahun-tahun yang dapat dibagi dengan angka sepuluh. Sistem yang digunakan dalam implementasi sensus penduduk adalah kombinasi antara *de jure* bagi penduduk yang bertempat tinggal tetap dan *de facto* bagi penduduk yang bertempat tinggal tidak tetap. Pelaksanaan Sensus Penduduk menggunakan dua cara pencacahan yaitu :

1. Pencacahan secara lengkap yang ditujukan kepada semua penduduk yang berdomisili di wilayah geografis Indonesia untuk memperoleh *explanation-explanation* atau keterangan-keterangan dasar seperti umur, jenis kelamin dan status kewarganegaraan.
2. Pencacahan secara sampel yang bertujuan memperoleh keterangan-keterangan yang lebih lengkap dan detail dari penduduk yang tinggal dalam wilayah-wilayah pencacahan yang terpilih.

1.3.2. Survei Sosial Ekonomi Nasional

Sejak tahun 1963 data tentang keadaan sosial ekonomi penduduk setiap tahun dikumpulkan melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dengan mengambil modul yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan. Di dalam implementasinya SUSENAS hanya mencakup beberapa modul yang dilakukan secara teratur dan terinci dengan maksud agar setiap modul dapat diamati perkembangannya, sehingga hasil yang diperoleh dipergunakan sebagai indikator untuk modul yang bersangkutan.

Disamping data modul, Susenas juga mengumpulkan data KOR (pokok) yang sangat berguna untuk mengetahui berbagai macam data pokok seperti pendidikan, kesehatan dan gizi, lingkungan perumahan, sosial budaya dan lain-lain.

1.3.3. Survei Angkatan Kerja Nasional

Dalam penyusunan Inkesra ini juga, khusus untuk analisis data ketenagakerjaan bersumber dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).

1.3.4. Sumber Data Lain

Selain dari Sensus dan Survei, Indikator Kesejahteraan Rakyat 2012 juga mengambil data yang berasal dari dinas/instansi yang terkait sebagai sumber data sekunder (*Secondary source*).

<http://ntb.bps.go.id>

II. KEPENDUDUKAN

Jumlah, komposisi dan distribusi penduduk merupakan sebagian dari masalah kependudukan yang perlu mendapat perhatian dalam proses pembangunan, belum lagi kualitas penduduk yang relatif masih rendah. Kondisi ini menjadikan penduduk lebih diposisikan sebagai beban dalam proses pembangunan daripada sebagai modal pembangunan, sehingga secara makro hal ini dijadikan landasan kebijakan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.

Kebijakan pembangunan sektor kependudukan memiliki posisi yang amat strategis karena proses pembangunan pada akhirnya akan bermuara pada penduduk. Oleh sebab itu untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional dalam hal penanganan penduduk, pemerintah tidak saja terfokus pada pengendalian jumlah penduduk melainkan juga konsen terhadap peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Penduduk adalah sebagai subyek dan sekaligus sebagai obyek pembangunan, karena itu kebijakan pembangunan dan kependudukan yang dilakukan oleh pemerintah adalah mengendalikan pertumbuhan penduduk, mengarahkan mobilitas penduduk, dan meningkatkan kualitas penduduk yang didukung oleh sistem informasi kependudukan yang handal sehingga mampu memperbaiki kualitas penduduk, baik untuk aspek kesehatan, pendidikan, dan perekonomiannya.

2.1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Secara absolut penduduk Nusa Tenggara Barat setiap tahun terus bertambah. Hasil Sensus Penduduk 1971 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Nusa Tenggara Barat sebanyak 2.203 ribu jiwa, bertambah pada tahun 1980 menjadi 2.724 ribu jiwa dan tahun 1990 bertambah lagi menjadi 3.369 ribu jiwa serta tahun 2000 berdasarkan hasil Sensus Penduduk bertambah juga menjadi 4.009 ribu jiwa. Hasil Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Nusa Tenggara Barat bertambah menjadi 4.500 ribu jiwa dan tahun 2012 jumlah penduduk Nusa Tenggara Barat mencapai 4.587 ribu jiwa. Dengan jumlah penduduk yang begitu besar, maka Nusa Tenggara Barat dihadapkan pada permasalahan kependudukan yang cukup serius. Oleh karena itu upaya pengendalian pertumbuhan penduduk yang disertai dengan peningkatan kesejahteraan penduduk harus merupakan suatu upaya yang berkesinambungan dengan program pembangunan yang sedang dan akan terus dilaksanakan.

Tabel 2.1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Tahun 1971- 2010

Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk (000)						Laju Pertumbuhan			
	1971	1980	1990	2000	2010	2012	71-80	80-90	90-00	00-10
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Lombok Barat	510	655	584	700	600	613	2,80	2,75	1,83	1,50*
Lombok Tengah	476	577	679	784	860	875	2,11	1,64	1,45	0,94
Lombok Timur	596	725	865	1.023	1.106	1.123	2,19	1,78	1,69	0,78
Sumbawa	244	304	373	379	416	423	2,48	2,06	2,26*	0,94
Dompu	74	96	145	190	219	224	2,86	4,22	2,76	1,44
Bima	303	367	448	396	439	447	2,10	2,02	1,44*	1,05
Sumbawa Barat	-	-	-	88	115	118	-	-	-	2,73
Lombok Utara	-	-	-	-	200	204	-	-	-	-
Kota Mataram	-	-	275	332	403	413	-	-	1,89	1,97
Kota Bima	-	-	-	117	143	146	-	-	-	2,03
NTB	2.203	2.724	3.369	4.009	4.500	4.587	2,36	2,15	1,75	1,17

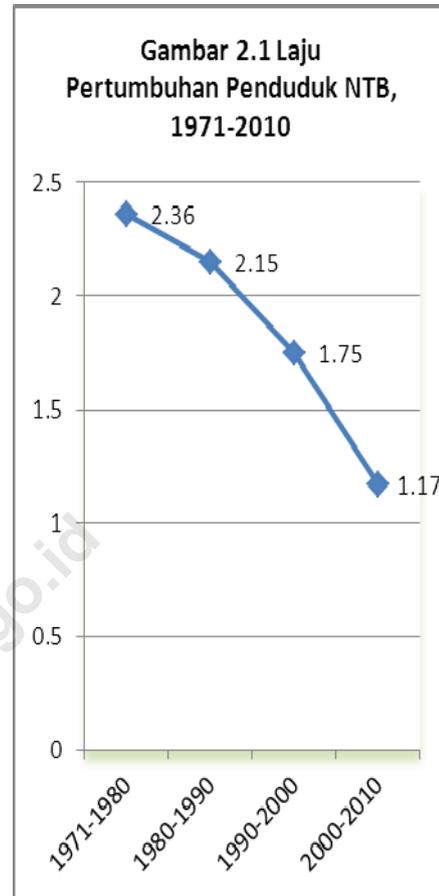
Sumber : SP 1971-2010, Estimasi Penduduk 2012

Tabel 2.1. memberikan gambaran mengenai jumlah dan perkembangan penduduk masing-masing kabupaten/kota dari tahun 1971-2012. Dari sembilan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Timur memiliki jumlah penduduk terbesar yaitu 1.123 ribu orang pada tahun 2012, sedangkan yang paling sedikit penduduknya adalah Kabupaten Sumbawa Barat yaitu sebesar 118 ribu jiwa.

Jika dibandingkan laju pertumbuhan penduduk antar kabupaten/kota, terlihat bahwa angkanya sangat bervariasi. Dalam kurun waktu 1971 – 2000, Kabupaten Dompu selalu memiliki laju pertumbuhan penduduk tertinggi di antara seluruh kabupaten/kota yang ada. Tingginya laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Dompu pada kurun waktu tersebut, selain karena pertumbuhan penduduk alami, Kabupaten Dompu merupakan daerah penerima atau tujuan transmigrasi. Pada periode 2000-2012 angka laju pertumbuhan penduduk terlihat variasinya dengan rentang 0,94 - 2,73. Kabupaten dengan rata-rata laju pertumbuhan terendah adalah Kabupaten Lombok Timur yaitu 0,78 persen per tahun dan yang tertinggi adalah Kabupaten Sumbawa Barat yang mencapai 2,73 persen per tahun. Tingginya angka laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sumbawa Barat tersebut

karena selain pertumbuhan penduduk alami, ketersediaan lapangan pekerjaan seperti di pertambangan dan pemerintahan baru mendorong penduduk luar daerah mencari pekerjaan di sana.

Secara absolut setiap tahun penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami pertumbuhan cukup besar, namun dalam kurun waktu 1971-2010 pertumbuhan penduduk mengecil. Hal ini dapat dilihat dari laju pertumbuhan penduduk yang menunjukkan penurunan. Laju pertumbuhan penduduk periode 1971-1980 sebesar 2,36 persen dan periode tahun 1980-1990 menurun menjadi 2,15 persen, ini berarti terjadi penurunan sebesar 0,21 persen dibandingkan periode 1971-1980. Indikasi penurunan laju pertumbuhan penduduk berlanjut pada periode 1990-2000 yang besarnya 1,75 persen kemudian pada periode tahun 2000-2010 laju pertumbuhan penduduk per tahun kembali mengalami penurunan menjadi 1,17 persen.



Penurunan laju pertumbuhan penduduk dalam periode 1971-2010 ini salah satunya disebabkan oleh faktor migrasi penduduk keluar dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, seperti penduduk yang bekerja ke luar negeri atau yang melanjutkan sekolah ke provinsi lain. Selain itu, keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan dan keluarga berencana, memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan tingkat kelahiran dan kematian sehingga laju pertumbuhan penduduk pun menjadi turun. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 1971-2010 terjadi penurunan Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate/TFR*). Pada Tabel 2.2 terlihat bahwa TFR sejak tahun 1971-2010 mengalami penurunan, yaitu dari 6,66 menjadi 2,59. Hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata wanita di Nusa Tenggara Barat akan melahirkan 2-3 anak selama masa reproduksinya. Sementara CBR selama kurun waktu 1990-2010 mengalami penurunan dari 25,4 menjadi 21,3, meskipun begitu terlihat pada tabel 2.2 pada periode tahun 2000 sampai 2010 CBR

mengalami peningkatan dari 17,3 menjadi 21,3. Angka ini berarti bahwa telah terjadi 21,3 kelahiran per 1.000 penduduk pada tahun 2010.

Tabel 2.2. Perkembangan TFR dan CBR di Nusa Tenggara Barat, 1971-2010

	1971	1980	1990	2000	2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
TFR	6,66	6,49	4,98	2,92	2,59
CBR	-	-	25,4	17,3	21,3

Sumber : SP 1971-2010

2.2. Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Persebaran penduduk yang tidak merata dapat berdampak terhadap perencanaan pola pembangunan daerah. Ketidakmerataan penduduk dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya keadaan geografis yang mempunyai kondisi alam yang subur dan ketersediaan lapangan pekerjaan. Faktor lain yang juga mempengaruhi adalah daya tarik wilayah yang menjadi pusat pemerintahan, perekonomian dan jasa serta pusat pendidikan.

Tabel 2.3. memperlihatkan persebaran penduduk menurut kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terdapat ketimpangan penyebaran antar kabupaten/kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat bahkan antar dua pulau besar yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Lebih dari 70 persen penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat terkonsentrasi di Pulau Lombok dan sisanya berada di Pulau Sumbawa. Pada tahun 2012 kabupaten yang mempunyai jumlah penduduk terbesar adalah Kabupaten Lombok Timur dan yang terkecil penduduknya adalah Kabupaten Sumbawa Barat. Jika dibandingkan dengan luas wilayahnya, kabupaten-kabupaten yang terletak di Pulau Sumbawa menghadapi permasalahan seperti yang diungkapkan di atas yaitu perbandingan luas wilayah dan sumber daya alam yang ada dengan sumber daya manusia tidak berimbang sehingga untuk mencapai pemerataan penduduk perlu diupayakan kebijakan pembangunan secara lebih optimal.

Tabel 2.3. Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Tahun 1971 - 2012

Kabupaten/Kota	Persentase Wilayah	Persentase Penduduk					
		1971	1980	1990	2000	2010	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Lombok Barat	8,18	23,14	24,05	17,33	17,46	13,33	
Lombok Tengah	7,08	21,65	21,18	20,14	19,55	19,11	
Lombok Timur	7,97	27,03	26,62	25,69	25,52	24,57	
Sumbawa	32,97	11,05	11,17	11,07	9,46	9,24	
Dompu	11,53	3,36	3,52	4,29	4,74	4,87	
Bima	21,78	13,77	13,46	13,30	9,88	9,76	
Sumbawa Barat	9,17	*)	*)	*)	2,20	2,55	
Lombok Utara		*)	*)	*)	*)	4,45	
Kota Mataram	0,28	*)	*)	8,16	8,28	8,95	
Kota Bima	1,03	*)	*)	*)	2,92	3,17	
NTB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Sumber : SP 1971 – 2010, Estimasi Penduduk 2012

Keterangan : *) Masih bergabung dengan kabupaten induk

Dari sisi wilayah, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan dua pulau besarnya yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa memiliki luas wilayah sebesar 20.153,15 km², dimana dua pertiganya merupakan luas Pulau Sumbawa dan sisanya merupakan luas Pulau Lombok. Tingkat kepadatan penduduknya terus bertambah dari 109 jiwa/km² pada tahun 1971 hingga menjadi 227 jiwa/km² tahun 2012.

Tabel 2.4. Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Tahun 1971 - 2012

Kabupaten/ Kota	Luas Wilayah (Km2)	Kepadatan Penduduk (orang/km2)					
		1971	1980	1990	2000	2010	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Lombok Barat	5.23	229	384	362	376*	569	581.82
Lombok Tengah	6.00	334	404	475	649	712	724.29
Lombok Timur	7.97	371	452	539	637	689	699.75
Sumbawa	32.97	29	36	44	57	63	63.67
Dompu	11.53	32	41	62	82	94	96.22
Bima	21.78	66	80	97	90	100	101.90
Sumbawa Barat	9.17	*)	*)	*)	48	62	64.15
Lombok Utara	4.02	*)	*)	*)	*)	247	251.46
Kota Mataram	0.30	*)	*)	4.295	5.414	7.149	6.740.78
Kota Bima	1.03	*)	*)	*)	563	687	705.09
NTB	100.00	109	135	167	376	223	227.63

Sumber : SP 1971 – 2000, Estimasi Penduduk 2012

Keterangan : *) Masih bergabung dengan kabupaten induk

Tabel 2.4. memberikan gambaran mengenai perbandingan luas wilayah dan tingkat kepadatan penduduk pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 2012 Kabupaten Sumbawa dengan luas wilayah sebesar 6.643,98 km² memiliki tingkat kepadatan penduduk paling kecil yaitu 63,67 jiwa/km². Kenyataan dan kondisi yang sangat kontradiktif ditunjukkan oleh Kota Mataram dimana dengan luas wilayah paling kecil yaitu sekitar 61,3 km², Kota Mataram merupakan yang terpadat jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain dengan tingkat kepadatan 6.740.78 jiwa/km². Padatnya penduduk Kota Mataram disamping disebabkan karena perannya sebagai pusat pemerintahan tetapi juga dipengaruhi oleh faktor daya tarik lainnya seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lainnya dimana sebagian besar terpusat di Kota Mataram sehingga bisa menjadi pendorong tingginya arus urbanisasi ke Kota Mataram

2.3. Struktur Umur

Pengelompokan umur sangat dibutuhkan dalam berbagai analisa kependudukan dan ini sering digunakan sebagai dasar untuk mengambil kebijakan/keputusan yang berkaitan program pembangunan seperti kegiatan pembangunan dengan sasaran pada kelompok umur tertentu, misalnya balita (0 - 4), angkatan kerja, penduduk usia sekolah, penduduk usia subur dan lain sebagainya.

Tabel 2.5. Distribusi Penduduk menurut Kelompok Umur, 1971 – 2012

Kelompok Umur	1971	1980	1990	2000	2010	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0 – 4	18,6	16,6	14,3	11,3	10,6	10.58
5 – 9	17,4	16,7	14,3	11,8	10,4	10.22
10 – 14	9,3	11,2	13,1	12,1	10,2	10.09
15 – 19	8,7	9,0	10,2	10,5	9,5	9.49
20 – 24	7,2	7,6	7,7	8,9	8,6	8.55
25 – 29	8,5	7,5	7,7	8,8	9,0	8.82
30 – 34	6,9	6,1	6,8	7,5	7,9	7.98
35 – 39	6,4	6,1	6,1	6,9	7,5	7.49
40 – 44	5,0	4,8	4,6	5,7	6,2	6.35
45 – 49	3,3	3,8	4,2	4,5	5,2	5.28
50 – 54	3,2	3,4	3,2	3,7	4,5	4.60
55 – 59	1,4	2,0	2,4	2,5	3,1	3.23
60 – 64	2,0	2,2	2,0	2,4	2,7	2.66
65+	2,2	3,1	3,3	3,4	4,6	4.66
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

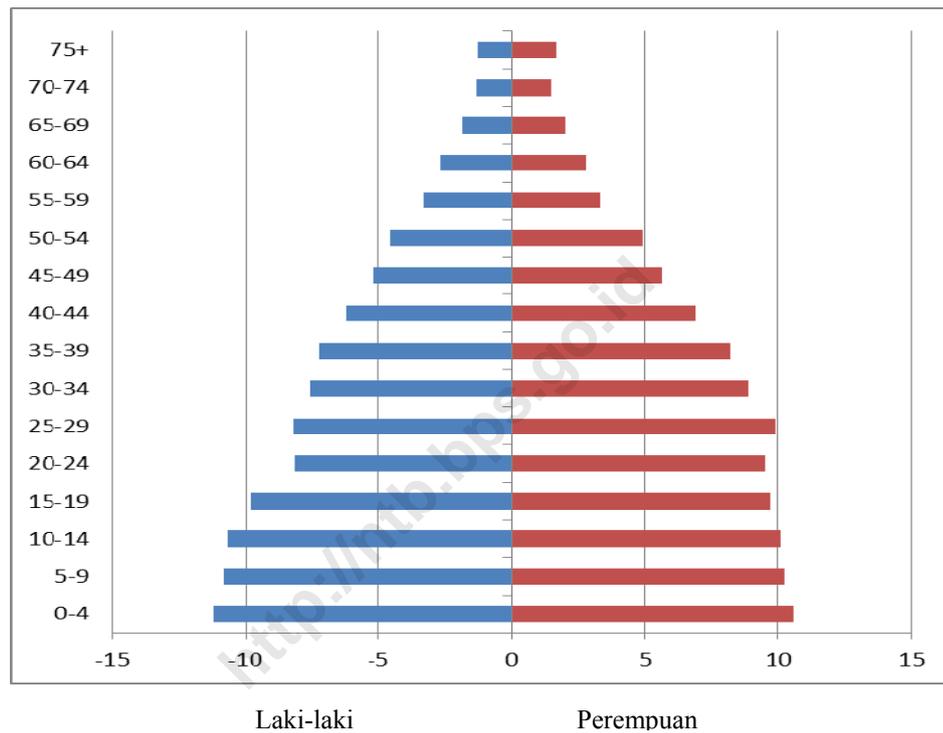
Sumber : BPS, SP1971 - SP2010, Estimasi Penduduk 2012

Tabel. 2.5. memperlihatkan distribusi penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat menurut kelompok umur. Tabel tersebut memperlihatkan hasil Sensus Penduduk dari tahun 1971 sampai estimasi penduduk tahun 2012, terlihat bahwa persentase kelompok umur muda (0 - 14 tahun) mengalami penurunan dan sebaliknya ada kenaikan untuk kelompok umur usia produktif dan lanjut usia. Keadaan ini akan membawa berbagai konsekuensi, antara lain kebijakan penyantunan penduduk usia lanjut, baik dari segi sosial ekonomi maupun kesehatannya. Selain itu, dengan meningkatnya usia produktif membawa konsekuensi perlunya penambahan lapangan pekerjaan dan lain sebagainya.

Gambaran mengenai distribusi penduduk juga dapat dilihat dari Piramida Penduduk. Dengan melihat gambar piramida penduduk, secara sekilas kita mengetahui struktur umur

penduduk dan implikasinya terhadap tuntutan pelayanan kebutuhan dasar penduduk (baik balita, remaja, dewasa, laki-laki dan perempuan, dan lansia) sekaligus melihat potensi tenaga kerja serta membayangkan kebutuhan akan tambahan kesempatan kerja yang harus diciptakan. Dari gambar piramida penduduk bisa dilihat bahwa Provinsi NTB masih memiliki struktur umur muda dimana penduduk usia 0-14 tahun melebar. Jumlah penduduk perempuan di kelompok usia ini lebih besar dibandingkan penduduk laki-laki

Gambar 2.2 Piramida Penduduk Tahun 2012 (Estimasi Penduduk 2012)



2.4. Rasio Jenis Kelamin

Informasi tentang rasio jenis kelamin atau perbandingan penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan, dapat bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan berbagai ragam aspek pelayanan seperti jenis pelayanan untuk penduduk laki-laki dan perempuan. Selain itu rasio jenis kelamin juga berhubungan dengan pola migrasi penduduk laki-laki dan perempuan.

Tabel 2.6. Rasio Jenis Kelamin menurut Kelompok Umur, 1971-2012

Kelompok Umur	1971	1980	1990	2000	2010	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

0 – 4	95,0	100,8	103,9	103,4	105,7	105.47
5 – 9	103,5	100,0	102,9	106,4	105,3	105.47
10 – 14	112,3	111,0	101,9	106,2	104,9	105.32
15 – 19	98,7	102,8	96,3	95,2	99,1	101.33
20 – 24	71,0	79,0	74,0	73,8	83,1	85.58
25 – 29	85,4	88,7	82,5	82,3	83,2	82.70
30 – 34	92,1	89,3	86,3	85,8	85,6	85.05
35 – 39	109,1	103,9	97,8	88,7	89,2	88.70
40 – 44	104,3	100,5	91,2	94,4	90,2	90.02
45 – 49	124,4	104,5	98,6	101,8	92,5	92.03
50 – 54	100,8	99,5	103,9	101,6	93,7	93.00
55 – 59	84,7	87,1	105,6	104,5	100,9	99.46
60 – 64	89,9	107,3	99,6	100,5	94,4	95.20
65 – 69	102,1	91,5	89,0	95,1	93,0	92.37
70 – 74	105,2	100,3	94,6	96,9	88,6	88.33
75 +	107,5	94,1	94,3	92,1	77,3	77.71
Total	99,1	98,3	95,5	94,9	94,3	94.46

Sumber : BPS, SP1971 - SP2000, Estimasi Penduduk 2012

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 1971, rasio jenis kelamin penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 99,1 yang berarti untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 99 penduduk laki-laki. Selama rentang waktu dari tahun 1971 hingga 2012, rasio ini mengalami penurunan secara perlahan sehingga mencapai angka 94,46 pada tahun 2012. Besaran rasio jenis kelamin yang kurang dari 100, diantaranya memberikan indikasi bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan daerah pengirim migran, khususnya tenaga kerja laki-laki ke luar daerah/negeri, seperti yang ditunjukkan oleh rasio jenis kelamin pada kelompok umur muda/produktif (20 – 54 tahun).

2.5. Angka Beban Tanggungan

Rasio ketergantungan atau dependency ratio sangat penting dalam studi bidang ekonomi, karena nilai rasio ketergantungan dapat menggambarkan beban tanggungan ekonomi kelompok usia produktif yaitu umur 15 – 64 tahun terhadap kelompok tidak produktif baik usia muda maupun tua yaitu umur 0 – 14 tahun dan 65 tahun keatas.

Tabel 2.6. Rasio Ketergantungan Penduduk Muda dan Tua, 1971 - 2012

Rasio Ketergantungan	1971	1980	1990	2000	2010	2012
Penduduk Usia Muda	85,22	84,65	76,12	57,43	48,45	47,92
Penduduk Usia Tua	4,04	5,87	6,14	5,65	7,09	7,24
Total	89,26	90,51	82,26	63,09	55,55	55,16

Sumber : BPS, SP1971 - SP2000, Estimasi Penduduk 2012

Berdasarkan tabel 2.6. dapat diketahui bahwa selama periode tahun 1971 sampai dengan 2012 beban tanggungan ekonomi usia produktif terhadap usia muda dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 1971, rasio ketergantungan Provinsi Nusa Tenggara Barat tercatat sebesar 89,26 yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 89 penduduk usia tidak produktif dimana 85 diantaranya tergolong penduduk usia muda dan sisanya penduduk usia tua. Pada tahun 2012 angka beban ketergantungan menurun dari 55,16 pada tahun 2000 menjadi 55,55 orang pada tahun 2012. Hal ini berarti setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 55 penduduk usia tidak produktif, dimana 48 diantaranya tergolong pada penduduk usia muda dan sisanya penduduk usia tua

2.6. Rata-rata Umur Perkawinan Pertama

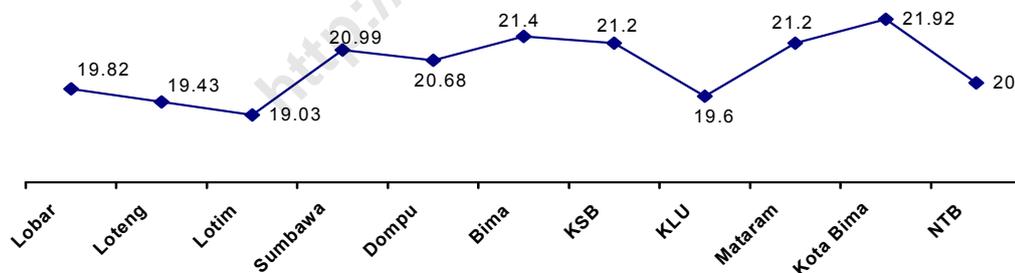
Perkawinan merupakan suatu hal yang bersifat manusiawi, maksudnya adalah pada saat manusia mencapai kondisi tertentu (fisik dan atau cukup materi) tiap manusia akan melangsungkan perkawinan. Hal ini memang menjadi idaman bagi setiap manusia karena mempunyai makna dalam penerus keturunan.

Jika dilihat dari usia perkawinan pertama, umumnya usia perkawinan perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini dapat dipahami karena kondisi fisik perempuan lebih cepat dewasa dibandingkan laki-laki dan tanggungjawab utama rumahtangga biasanya sepenuhnya di tangan suami, sehingga perempuan tidak harus menunggu sampai mampu atau mendapatkan suatu pekerjaan untuk melangsungkan perkawinan.

Rata-rata umur perkawinan pertama merupakan salah satu indikator untuk menggambarkan tingkat fertilitas penduduk, karena semakin muda seseorang melakukan perkawinan semakin panjang pula masa reproduksinya, sehingga semakin besar peluang untuk melahirkan anak.

Adapun umur perkawinan itu sendiri dipengaruhi juga oleh berbagai faktor yang umumnya mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Nilai-nilai ekonomi, sosial dan budaya yang tadinya mendukung fertilitas tinggi melalui perkawinan usia muda semakin luntur. Selain itu para perempuan semakin diberikan kesempatan untuk sekolah dan bekerja, sehingga mereka akan cenderung menunda perkawinan atau membatasi kelahiran yang terjadi untuk dapat bersekolah maupun bekerja. Hal ini dapat dilihat pada gambar 2.3.

Gambar 2.3 Rata-rata Umur Perkawinan Pertama Perempuan Menurut Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat Tahun 2012



Sumber : Diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Gambar 2.3. memperlihatkan bahwa rata-rata usia perkawinan pertama untuk perempuan yang pernah kawin tahun 2012. Rata-rata usia perkawinan pertama perempuan di Provinsi NTB berkisar antara 18 - 21 tahun. Secara rata-rata, usia perkawinan pertama di Provinsi NTB sudah sesuai undang-undang perkawinan, yaitu di atas 16 tahun. Kabupaten Lombok Timur mempunyai rata-rata usia perkawinan pertama paling rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi NTB. Rata-rata usia perkawinan

pertama di Kabupaten Lombok Timur sekitar 19,03 tahun, sedangkan Kabupaten Bima mempunyai rata-rata usia perkawinan pertama paling tinggi, yaitu 21,92 tahun.

<http://ntb.bps.go.id>

III. KESEHATAN DAN GIZI

Masyarakat yang sehat akan menciptakan kehidupan yang berkualitas, karena kesehatan merupakan modal berharga bagi seseorang dalam melakukan aktivitasnya. Oleh sebab itu kesehatan menjadi salah satu aspek kesehateraan dan menjadi salah satu focus utama pembangunan manusia. Berkaitan dengan pembangunan kesehatan, pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan pelayanan kesehatan seperti puskesmas yang sasaran utamanya meningkatkan angka harapan hidup, menurunkan angka kematian bayi dan angka kematian ibu.

Upaya yang telah dilakukan diantaranya meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas, merata serta terjangkau yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin, menyediakan sumber daya kesehatan yang kompeten dan mendistribusikan tenaga kesehatan secara merata ke seluruh wilayah, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan puskesmas, rumah sakit polindes dan posyandu serta menyediakan obat-obatan yang terjangkau oleh masyarakat.

Keberhasilan atas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam bidang kesehatan dapat dikukur dengan beberapa indicator kesehatan antara lain angka harapan hidup, angka kematian bayi, angka kesakitan, dan indicator yang berkaitan dengan akses terhadap fasilitas kesehatan seperti persentase balita yang penolong persalinannya ditolong oleh tenaga medis, persentase penduduk yang berobat jalan ke rumah sakit, dokter/klinik, puskesmas, serta rasio tenaga kesehatan per penduduk.

3.1. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan

Upaya pemerintah untuk meningkatkan status kesehatan yang selanjutnya juga berdampak kepada meningkatnya derajat kesehatan penduduk terus dilakukan. Hal ini dibuktikan dari pembangunan sarana dan prasarana kesehatan yang terus dilakukan secara merata. Dengan harapan akses penduduk ke fasilitas kesehatan semakin mudah. Tabel 3.1 memperlihatkan ketersediaan fasilitas kesehatan terhadap 100.000 penduduk.

Tabel 3.1 menunjukkan perkembangan ketersediaan fasilitas kesehatan yang diperuntukkan bagi masyarakat. Pada tahun 2010 rasio jumlah tenaga paramedis dan tenaga kesehatan lainnya terhadap 100.000 penduduk di Nusa Tenggara Barat sebanyak 125,372 mengalami peningkatan pada tahun 2012 menjadi 155,49. Sementara itu, tenaga dokter rasionya juga mengalami peningkatan dari 11,95 pada tahun 2010 menjadi 20,77

pada tahun 2012. Untuk puskesmas yang merupakan sarana kesehatan paling mudah diakses oleh masyarakat mengalami penurunan, yaitu rasio terhadap 100.000 penduduk pada tahun 2010 sebesar 15,04 menjadi 15,50 pada tahun 2012.

Tabel 3.1 Rasio Fasilitas/Tenaga Kesehatan Per 100.000 Penduduk di NTB Tahun 2010 dan 2012

Fasilitas/Tenaga Medis	2010	2012
Rumah Sakit	0,9	0,48
Puskesmas	15,04	15,50
Dokter	11,95	20,77
Tenaga Paramedis/Kesehatan Lainnya	125,372	155,49

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTB

3.2. Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

3.2.1. Keluhan Kesehatan

Tingkat kesehatan di suatu wilayah dapat dilihat dari besarnya angka kematian bayi dan usia harapan hidup penduduk. Angka kematian bayi di Provinsi NTB masih termasuk tinggi dibandingkan provinsi lain di Indonesia, angka ini jauh dari angka nasional yaitu 34 per 1000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi di Provinsi NTB menurut hasil SDKI tahun 2007 sebesar 72 per 1000 kelahiran hidup sedangkan menurut hasil SDKI tahun 2012 angka ini mengalami penurunan sebesar 57 per 1000 kelahiran hidup.

Demikian halnya dengan angka harapan hidup yang mengalami peningkatan dari 62,11 pada tahun 2010 menjadi 62,41 di tahun 2011. Angka tersebut menunjukkan bahwa rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh anak-anak yang lahir tahun 2012 adalah 62,41 tahun. Peningkatan angka harapan hidup ini karena sangat dipengaruhi beberapa faktor seperti lingkungan, pelayanan kesehatan, keturunan dan perilaku masyarakat yang sudah mulai melakukan hidup sehat.

Untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat, dapat terlihat dari angka morbidity (angka kesakitan) yang menunjukkan adanya gangguan/keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktifitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumahtangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Pada umumnya keluhan kesehatan yang mengindikasikan adanya suatu penyakit yang biasa dialami oleh

penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma/napas sesak, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, dll. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan di wilayah tersebut dan menunjukkan angka morbiditas di wilayah tersebut tinggi.

Tabel 3.2. Persentase Penduduk Yang Mengalami Keluhan Kesehatan Sebulan Yang Lalu dan Angka Kesakitan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010 - 2012

Kabupaten/kota	Keluhan	
	2010	2012
Lombok Barat	34,61	20,94
Lombok Tengah	31,14	39,65
Lombok Timur	43,05	42,72
Sumbawa	36,22	34,10
Dompu	37,45	18,20
Bima	33,21	31,19
Sumbawa Barat	44,80	43,51
Lombok Utara	32,68	21,35
Kota Mataram	49,21	33,27
Kota Bima	48,80	34,01
NTB	38,10	20,94

Sumber : Diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Tabel 3.2 menggambarkan keadaan kesehatan masyarakat di Nusa Tenggara Barat dalam kurun waktu 2010-2012. Dalam kurun waktu tersebut terlihat bahwa semakin meningkat penduduk yang mengalami keluhan kesehatan. Di Nusa Tenggara Barat pada keadaan tahun 2010 persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan hanya sebanyak 39,85 persen kemudian menurun menjadi sebanyak 38,10 persen keadaan tahun 2012. Kondisi seperti ini juga dialami oleh semua kabupaten/kota, yaitu terjadi peningkatan banyaknya penduduk yang mengalami keluhan kesehatan.

Gambaran tersebut di atas memberikan salah satu indikasi bahwa masih cukup banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan namun kecenderungannya menurun.

3.2.2. Rata-Rata Lama Sakit

Lama sakit merupakan salah satu indikator kesehatan yang memberikan gambaran mengenai kondisi keluhan kesehatan yang dirasakan oleh penduduk. Semakin lama (hari) sakit maka jenis keluhan kesehatan (penyakit) yang dialami dapat diasumsikan cukup serius. Menurunnya angka morbiditas pada tahun 2012 tidak dapat dikatakan sebagai kondisi kesehatan penduduk yang lebih baik, jika tidak diikuti dengan menurunnya rata-rata lama sakit (hari). Tabel 3.3 menunjukkan gambaran kondisi rata-rata lama sakit (hari) penduduk di Nusa Tenggara Barat.

Rata-rata lama sakit penduduk di Nusa Tenggara Barat dari tahun 2010 – 2012 mengalami penurunan, yaitu sekitar 6,04 hari pada Tahun 2010 dan menurun menjadi 5,37 hari pada Tahun 2012. Apabila dilihat masing-masing kabupaten/kota, terlihat bahwa pada Tahun 2012 Kota Mataram mempunyai rata-rata lama sakit paling pendek dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya yaitu hanya 4,33 hari, sedangkan kabupaten yang mempunyai rata-rata lama sakit yang paling lama terjadi di Kabupaten Lombok Tengah, yaitu sekitar 6 hari.

Tabel 3.3. Rata-rata Lama Sakit Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010-2012

Kabupaten/Kota	2010	2012
Lombok Barat	6,31	4,92
Lombok Tengah	6,40	6,20
Lombok Timur	5,57	5,08
Sumbawa	6,82	5,59

Dompu	6,24	5,43
Bima	6,93	5,72
Sumbawa Barat	5,77	6,02
Lombok Utara	4,46	4,50
Kota Mataram	5,60	4,33
Kota Bima	5,84	4,63
NTB	6,04	5,37

Sumber : Diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

3.2.3. Cara Pengobatan

Akses penduduk dalam memanfaatkan tenaga kesehatan juga bisa dilihat dari fasilitas/tempat dan tenaga kesehatan sebagai rujukan penduduk jika mengalami keluhan sakit sehingga harus pergi berobat. Dari informasi tersebut dapat diidentifikasi berbagai masalah yang dihadapi penduduk dalam mengakses dan memanfaatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan. Beberapa faktor yang mejadi pertimbangan penduduk adalah jarak tempat tinggal dengan leatak sarana pelayanan kesehatan, kualitas pelayan , kondisi social ekonomi penduduk yaitu kemampuan penduduk untuk membiayai pengobatannya serta jenis pelayanan kesehatan

Ada dua cara pengobatan terhadap gangguan kesehatan yang biasanya dilakukan oleh masyarakat, yaitu mengobati sendiri dan atau pergi ke fasilitas kesehatan. Apabila seseorang mengalami gangguan kesehatan, biasanya akan berusaha terlebih dahulu mengobati sendiri penyakit tersebut, setelah beberapa waktu tidak mengalami kesembuhan, barulah akan pergi ke fasilitas kesehatan yang ada. Tindakan seperti itu sebetulnya kurang baik, karena pemberian obat tanpa diagnosa akan berbahaya bagi si penderita dan keterlambatan dalam penanganan penyakit akan berakibat sangat fatal, akhirnya dapat berlanjut pada pengobatan dengan rawat inap.

Tabel 3.4 : Persentase Penduduk Mengalami Keluhan Kesehatan yang berobat Sendiri Menurut Kabupaten/kota dan Yang Pernah Mengobati Sendiri Tahun 2010-2012

Kabupaten/kota	Tahun	
	2010	2012
Lombok Barat	73,02	51,28
Lombok Tengah	52,65	61,58
Lombok Timur	56,77	69,17
Sumbawa	75,46	70,30
Dompu	83,88	77,36
Bima	67,04	84,13
Sumbawa Barat	68,84	62,42
Lombok Utara	80,15	57,35
Kota Bima	55,75	65,33
Kota Mataram	52,53	63,54
NTB	62,87	66,58

Sumber : Diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Tabel 3.4 menunjukkan gambaran perilaku penduduk dalam melakukan pengobatan terhadap keluhan kesehatan yang dialami. Terlihat dari tabel 3.4, pada tahun 2012 sebagian besar penduduk yang mengalami keluhan kesehatan melakukan pengobatan tanpa diagnosa (diobati sendiri) yaitu mencapai 66,58 persen, jika dibandingkan dengan tahun 2010 penduduk yang mengobati sendiri mengalami peningkatan. Kondisi menunjukkan masih banyak penduduk yang melakukan pengobatan sendiri. Tindakan ini diduga dilakukan oleh penduduk karena biaya yang dikeluarkan untuk membeli obat sangat murah/dapat terjangkau atau memang menganggap bahwa keluhan yang dialami tidak terlalu serius. Perilaku seperti ini cukup tinggi risikonya bagi masyarakat dan dapat membawa akibat yang lebih fatal.

Sedangkan penduduk yang melakukan pengobatan dengan diagnosa (ditangani tenaga kesehatan) baik secara langsung, maupun setelah melakukan pengobatan sendiri dapat dilihat pada tabel 3.5. Dari tabel 3.5 memperlihatkan bahwa masih relatif kecil penduduk yang mengalami keluhan kesehatan melakukan berobat jalan.

Pada umumnya pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh penduduk terkait kondisi ekonomi penduduk juga. Jika kita melihat perilaku berobat jalan masyarakat dalam kurun waktu tahun 2010-2012 telah mengalami penurunan, sebanyak 52,84 persen penduduk berobat jalan pada tahun 2010 mengalami penurunan menjadi 46,49 persen pada tahun 2012.

Tabel 3.5. Persentase Penduduk Yang Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Kabupaten/kota dan Yang Pernah Berobat Jalan Tahun 2010-2012

Kabupaten/kota	Pernah Berobat Jalan	
	2010	2012
Lombok Barat	49,41	50,18
Lombok Tengah	57,44	57,43
Lombok Timur	55,91	44,61
Sumbawa	48,72	42,75
Dompu	50,13	54,42
Bima	50,75	43,88
Sumbawa Barat	47,29	36,54
Lombok Utara	45,69	38,21
Kota Bima	53,87	34,77
Kota Mataram	48,69	40,95
NTB	52,84	46,49

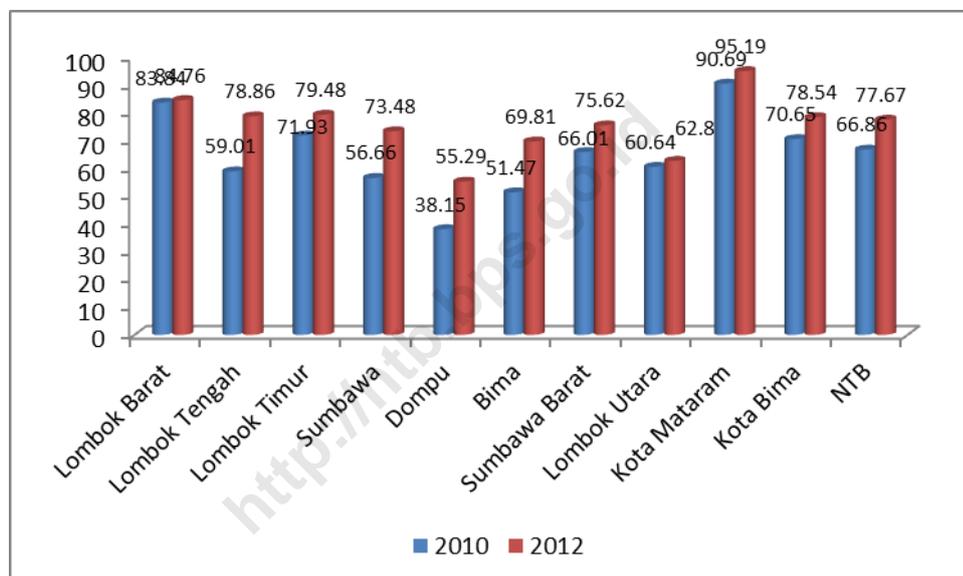
Sumber : Diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

3.2.4 Penolong Kelahiran Pertama

Untuk menurunkan Angka Kematian Ibu salah satunya adalah dengan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga medis dan peningkatan pelayanan neonatal, karena dapat mempengaruhi keselamatan ibu dan bayinya. Penolong persalinan yang ideal adalah tenaga medis karena mereka telah menerapkan proses persalinan yang memenuhi standar kesehatan. Oleh karena itu pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah selalu berupaya untuk memperluas akses, sarana pelayanan serta tenaga kesehatan dengan cara meningkatkan jumlah maupun kualitasnya.

Usaha pemerintah dalam menyediakan tenaga kesehatan ternyata memperlihatkan hasil yang baik, dimana persentase balita yang kelahirannya ditolong oleh tenaga kesehatan meningkat dari 66,86 persen di tahun 2010 menjadi 77,67 persen di tahun 2012. Kenaikan tersebut disebabkan oleh meningkatnya peran bidan sebagai penolong persalinan. Jika dilihat menurut Kabupaten/Kota, Kabupaten Dompu memiliki persentase penolong kelahiran oleh tenaga medis paling rendah yaitu 55,25 persen sedangkan yang tertinggi ada di Kota Mataram.

Gambar 3.1 Persentase Balita dengan Penolong Persalinan Pertama oleh Tenaga Medis menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010 dan Tahun 2012



IV. PENDIDIKAN

Pembukaan UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mencerdaskan masyarakat melalui pendidikan. Pendidikan menjadi sangat penting bagi suatu bangsa karena menjadi salah satu investasi bagi pembangunan dalam menentukan kualitas suatu bangsa. Pendidikan dapat mencetak generasi penerus yang berkualitas sehingga mendukung pembangunan.

Peranan pendidikan yang sangat penting tersebut menjadikan sector pendidikan sebagai sasaran utama dalam setiap program pembangunan. Tanpa pendidikan yang

berkualitas, program pembangunan tidak akan berjalan lancar. Upaya peningkatan kualitas pendidikan dilakukan dengan program pembangunan sarana prasarana sekolah, ditunjang dengan program bantuan biaya sekolah dan berbagai macam beasiswa. Indikator tentang pendidikan sangat diperlukan dalam hal ini sebagai alat untuk mengukur berhasil tidaknya pembangunan di sector pendidikan.

Berbagai macam indikator itu adalah Angka Melek Huruf (AMH), rata-rata lama sekolah, Angka Partisipasi sekolah (APS), Angka Partisipasi murni (APM), dan Angka Partisipasi Kasar (APK), dan rasio murid-guru.

4.1. Ketersediaan Fasilitas Pendidikan

Keberhasilan suatu proses pendidikan tidak terlepas dari ketersediaan sarana pendidikan yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung seperti gedung sekolah, serta peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik/guru diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan penduduk. Penyediaan sarana pendidikan harus senantiasa disesuaikan dengan jumlah dan pertumbuhan penduduk di suatu wilayah. Selama periode 2010 - 2012, terjadi peningkatan jumlah gedung sekolah di Provinsi NTB untuk semua tingkat pendidikan. Pada tahun 2011/2012, jumlah gedung sekolah SD sebanyak 3.080, SLTP dan SLTA termasuk SMK masing-masing sejumlah 559 dan 490 buah. Hal ini menunjukkan peningkatan dalam hal sarana fisik atau jumlah gedung sekolah untuk ketiga tingkat pendidikan dimana sebelumnya adalah 3.034 untuk SD, 529 untuk SLTP dan SLTA dan SMK 465 buah untuk tahun 2010/2011

Berdasarkan tabel 4.1 Rasio murid dibanding guru pada tahun 2011/2012, menurun jika dibandingkan dengan tahun 2010/2011. Menurunnya rasio murid guru dapat berimplikasi terhadap meningkatnya mutu pengajaran, karena berkurangnya beban pengawasan dan perhatian guru terhadap murid. Untuk tingkat SD, rasio murid guru pada tahun 2011/2012 mengalami kenaikan dengan kondisi tahun 2010/2011. Pada tahun 2010/2011 satu orang guru mengawasi dan mendidik sekitar 22-23 orang murid sedangkan pada tahun 2011/2012 satu orang guru mengawasi 21-22 orang murid.

Tabel 4.1. Rasio Murid-Guru Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2010/2011 dan 2011/2012

Tingkat Pendidikan	Rasio Murid-Guru	
	2010/2011	2011/2012
(1)	(2)	(3)
SD	22,91	22,07
SMP	22,42	21,13
SMA	21,23	21,29

Sumber : Dikpora Provinsi NTB

Untuk tingkat SMP, rasio murid guru pada tahun 2010/2011 mengalami penurunan dengan kondisi tahun 2011/2012. Pada tahun 2010/2011 satu orang guru hanya mengawasi dan mendidik sekitar 22-23 orang murid sedangkan pada tahun 2012/2011 satu orang guru mengawasi 21 orang murid.

Untuk tingkat SMA, rasio murid guru pada tahun 2010/2011 mengalami kenaikan dengan kondisi tahun 2011/2012. Pada tahun 2010/2011 satu orang guru hanya mengawasi dan mendidik sekitar 21-22 orang murid sedangkan pada tahun 2011/2012 satu orang guru mengawasi 21-22 orang murid.

Menurunnya rasio murid guru di tiap jenjang pendidikan, bukan karena berkurangnya jumlah murid, namun terlebih disebabkan karena perkembangan jumlah murid lebih kecil bila dibandingkan dengan perkembangan jumlah guru itu sendiri.

Kondisi pada tahun 2012/2011 ini jauh dari kondisi ideal yang diharapkan. Karena menurut Seno (1983), rasio guru murid yang ideal untuk SMP adalah 1:18 dan 1:16 untuk SMA. Sedangkan pada tabel 4.1 dapat diketahui rasio murid guru pada tahun 2012/2011 mencapai 21,13 untuk tingkat SMP dan 21,29 untuk tingkat SMA.

4.2. Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan

Tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk dapat menjadi salah satu indikator dari tingkat kemampuan SDM. Selama periode 2010-2012, tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk di Provinsi NTB mengalami peningkatan yang dicirikan dengan berkurangnya persentase penduduk yang berpendidikan rendah dan sebaliknya persentase penduduk yang berpendidikan tinggi meningkat. Persentase penduduk dengan tingkat pendidikan tertinggi tidak pernah sekolah dan tidak tamat SD,

mengalami penurunan. Sedangkan penduduk dengan tingkat pendidikan tamat SD, SLTP, SLTA, dan tamat akademi/ perguruan tinggi, persentasenya mengalami peningkatan.

Tabel 4.2. Persentase Penduduk berumur 10 tahun keatas menurut tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 dan 2012

Tingkat Pendidikan	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan +Perdesaan	
	2010	2012	2010	2012	2010	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tidak sekolah	33,34	28,68	43,33	39,11	39,10	34,71
Belum Tamat SD	23,19	23,73	27,49	28,18	25,67	26,30
Sekolah Dasar	16,40	16,99	14,44	15,68	15,27	16,23
SLTP	17,94	18,96	10,58	11,87	13,69	14,86
SLTA	2,74	2,88	1,23	1,51	1,87	2,09
Akademi + PT	0,57	0,92	0,79	0,63	0,70	0,75

Sumber : Diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, dapat dilihat dari tabel 4.2, Pada tahun 2010, jumlah penduduk yang tidak sekolah mencapai 39,10 persen, dan pada tahun 2012 persentase tersebut mengalami penurunan menjadi 34,71 persen, sedangkan penduduk 10 tahun keatas dengan pendidikan yang ditamatkan SD hingga Akademi/Perguruan Tinggi mengalami peningkatan dari tahun 2010 ke tahun 2012,

Untuk tingkat pendidikan yang ditamatkan bagi penduduk berusia 10 tahun keatas pada tahun 2012, peningkatan persentase yang cukup tinggi terjadi pada penduduk dengan tingkat pendidikan tertinggi tamat SLTA dan perguruan tinggi yaitu meningkat 0,22 persen untuk SLTA jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2010, sedangkan untuk perguruan tinggi meningkat sebesar 0,05 persen. Peningkatan persentase untuk tingkat pendidikan ini terkait dengan kesadaran dan kemampuan penduduk untuk mengenyam pendidikan di tingkat yang lebih tinggi semakin besar,

4,3, Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah (APS) dapat menunjukkan perbandingan penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu terhadap total penduduk pada umur tersebut, APS dapat menjadi salah satu indikator yang menggambarkan kesempatan penduduk untuk memperoleh pendidikan,

Umur penduduk dibagi ke dalam tiga kelompok untuk perhitungan APS tingkat pendidikan SD, SLTP, dan SLTA, Kelompok pertama 7-12 tahun untuk tingkat pendidikan SD, kelompok umur 13-15 tahun untuk tingkat pendidikan SLTP, dan kelompok umur 16-18 tahun untuk tingkat pendidikan SLTA, Dari tabel 4.3, berikut ini dapat diketahui APS penduduk di Provinsi NTB pada tahun 2010 dan 2012,

Tabel 4,3, Angka Partisipasi Sekolah di NTB menurut Kelompok Umur dan Daerah Tempat Tinggal Tahun 2010 dan 2012

Kelompok Umur	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan +Perdesaan	
	2010	2012	2010	2012	2010	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7-12	98,90	98,70	97,84	97,86	98,26	98,19
13-15	87,71	91,20	85,70	91,81	86,52	91,55
16-18	62,53	67,29	53,80	55,64	57,71	60,75

Sumber : Diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

APS penduduk Provinsi NTB mengalami peningkatan yaitu APS 13-15 dan APS 16-18 pada tahun 2012 jika dibandingkan dengan APS tahun 2010, Berdasarkan hasil Susenas 2010 dan 2012, APS tertinggi terdapat pada kelompok umur 7-12 tahun yaitu 98,19 persen tahun 2012, Hal ini berarti pada tahun 2012 dari 100 orang penduduk yang berumur 7-12 tahun, sekitar 98 orang sedang mengenyam pendidikan.

Pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun di Provinsi NTB belum mencapai 100 persen namun menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun 2010 ke tahun 2012.

Kondisi ini dapat dilihat dari APS pada kelompok umur 13-15 masih berkisar 91,55 persen pada tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar 86,52 persen, Artinya dari 100 orang penduduk pada kelompok umur 13-15 tahun, terdapat sekitar 92 orang penduduk yang sedang mengenyam pendidikan pada tahun 2012. Perlunya ditingkatkan kesadaran akan pentingnya program wajib belajar 9 tahun agar idealnya seluruh penduduk pada kelompok umur 13-15 tahun sedang mengenyam pendidikan,

Hal yang menggembirakan adalah, APS pada kelompok umur 16-18 tahun mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2010. Pada tahun 2010, terdapat sekitar 57,71 persen penduduk pada kelompok umur ini sedang mengenyam pendidikan, sementara di tahun 2012 terdapat sekitar 60,75 persen yang sedang mengenyam pendidikan.

Berdasarkan tabel 4,3, ada fenomena yang menarik yaitu semakin tinggi umur penduduk maka APS juga semakin menurun, Hal ini dapat disebabkan oleh faktor pola pikir masyarakat yang kurang positif memandang tentang arti pendidikan tinggi, Masih ada sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa pendidikan tinggi tidak akan menjamin perbaikan taraf hidup keluarga, Mereka lebih memilih untuk bekerja daripada harus mengenyam pendidikan. Pola pikir ini hendaknya perlu diubah demi kemajuan Provinsi NTB.

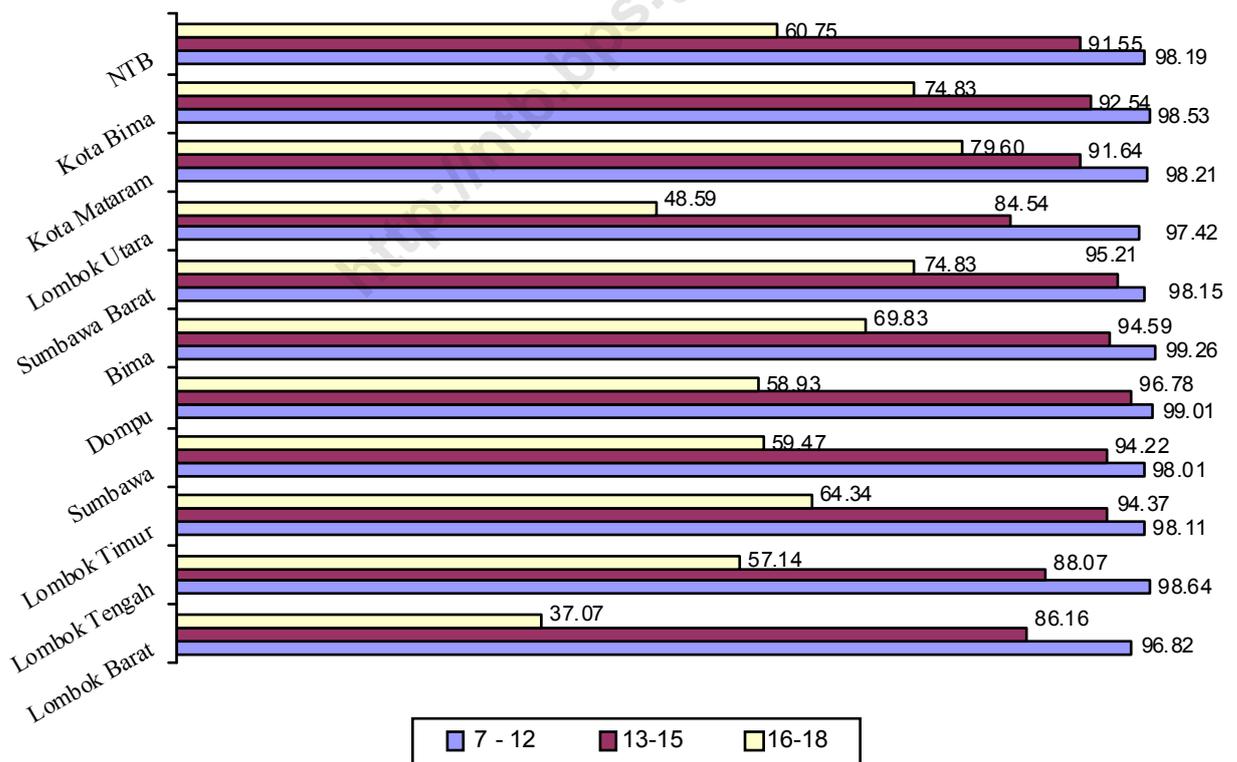
Apabila memperhatikan kondisi APS pada daerah perkotaan dan perdesaan, dapat dilihat bahwa kondisi APS di masing-masing kelompok umur untuk daerah perkotaan lebih tinggi bila dibandingkan dengan di daerah perdesaan, Hal ini tentunya mencerminkan bahwa kesadaran masyarakat dalam hal mengenyam pendidikan di daerah perkotaan lebih tinggi bila dibandingkan dengan masyarakat di daerah perdesaan,

Perbedaan APS menurut kelompok umur juga dapat dilihat menurut kabupaten/kota, Gambar 4,1, menunjukkan bahwa APS pada kelompok umur 7-12 tahun di semua kabupaten/kota sudah mencapai diatas 98 persen. Hal ini sangat menggembirakan disebabkan hampir semua penduduk umur sekolah dasar di kabupaten/kota telah menikmati pendidikan dasar.

Sedangkan pada kelompok umur 13-15 tahun, APS berkisar antara 84,54 persen sampai dengan 96,78 persen, Kabupaten Dompu memiliki APS tertinggi untuk kelompok umur 13-15 tahun yaitu sebesar 96,78 persen, sedangkan APS terendah terdapat di Kabupaten Lombok Utara sekitar 84,54 persen.

Untuk kelompok umur 16 – 18 tahun APS berkisar antara 37,07 sampai dengan 79,60 persen, angka ini menunjukkan kesenjangan yang cukup tinggi di antara kabupaten/kota. APS pada kelompok umur 16-18 tertinggi terdapat di Kota Mataram yaitu mencapai 79,60 persen, Sedangkan APS terendah pada kelompok umur 16-18 tahun terdapat di Kabupaten Lombok Barat sebesar 37,07 persen. Disparitas yang cukup tinggi ini menyiratkan perlunya pemerataan baik akses dan sarana pendidikan di seluruh Kabupaten/Kota serta sosialisasi pentingnya pendidikan khususnya pendidikan menengah keatas.

Gambar 4,1, Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur dan Kabupaten/ Kota Tahun 2012



Sumber : Diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

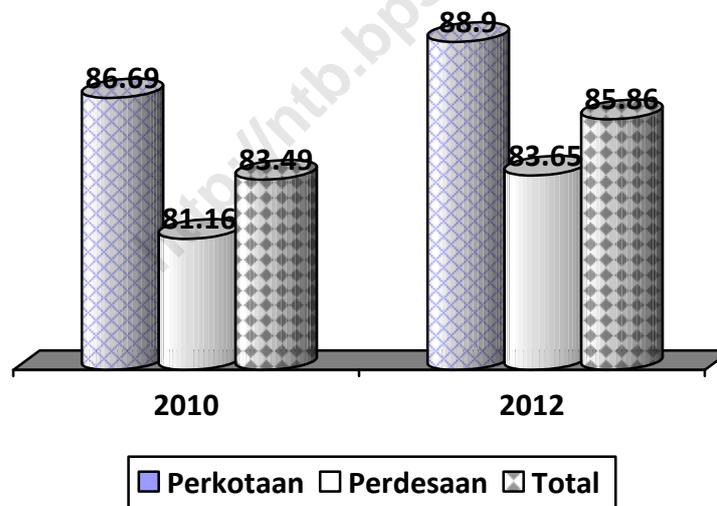
4,4, Melek Huruf

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan pendidikan adalah tingkat melek huruf, yang mengindikasikan kemampuan penduduk untuk dapat membaca dan menulis,

Ukuran yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan, secara makro dapat dilihat dari kemampuan baca tulis penduduk umur 10 tahun keatas, Kemampuan penduduk untuk membaca dan menulis disebut sebagai tingkat melek huruf, Dari hasil Susenas 2012, dapat diketahui bahwa angka melek huruf sudah mencapai lebih dari 85 persen penduduk, yaitu sebesar 86,86 persen, meningkat bila dibandingkan dengan keadaan pada tahun 2010 yang mencapai 83,49 persen,

Kemampuan baca tulis penduduk berumur 10 tahun keatas lebih tinggi persentasenya di daerah perkotaan bila dibandingkan di daerah perdesaan, Pada Tahun 2010 di daerah perkotaan 86,89 persen penduduk berumur 10 tahun keatas yang mampu membaca dan menulis dan pada tahun 2012 sudah mencapai 88,90 persen, sementara di daerah perdesaan 81,16 persen pada tahun 2010 dan 83,65 persen pada tahun 2012,

Gambar 4,2 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas yang Mampu Baca Tulis di Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 dan 2012



Sumber : Diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

V. KETENAGAKERJAAN

Ketenagakerjaan adalah salah satu aspek yang sangat erat kaitannya dengan masalah kesejahteraan, baik ditinjau dari sisi ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, pekerjaan dibutuhkan oleh seseorang dalam rangka usaha pemenuhan kebutuhan hidupnya. Sedangkan dari sisi sosial, pekerjaan dibutuhkan oleh seseorang berkaitan dengan pengakuan masyarakat terhadap kemampuan yang dimilikinya.

Dengan semakin berkembangnya jumlah penduduk yang tentunya diikuti oleh pertumbuhan jumlah tenaga kerja, maka pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sudah sepatutnya lebih diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai, tenaga kerja yang berasal dari suatu daerah akan mampu bersaing dengan tenaga kerja dari daerah lain, bahkan dari negara lain.

Untuk mengetahui kondisi ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat ada beberapa ukuran yang dapat digunakan, seperti : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Lapangan Pekerjaan Utama, Jumlah Jam Kerja dan Upah/Gaji yang biasa diterima.

5.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) didefinisikan sebagai proporsi jumlah penduduk yang tergolong angkatan kerja terhadap jumlah penduduk yang termasuk dalam usia kerja, yakni penduduk usia 15 tahun ke atas. Indikator ini dapat menjelaskan sampai sejauh mana keterlibatan penduduk dalam kegiatan perekonomian.

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), keterlibatan penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam kegiatan ekonomi antara tahun 2011-2012 mengalami sedikit penurunan. Ini terlihat dari penurunan TPAK dari 66,12 persen pada tahun 2011, turun menjadi 66,02 persen pada tahun 2012.

Untuk mengetahui perkembangan TPAK masing-masing kabupaten/kota pada tahun 2011 dan 2012 dapat dilihat pada tabel 5.1. Pada tahun 2012, Kabupaten Lombok Tengah memiliki TPAK tertinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya yakni sebesar 72,46 persen. Kemudian disusul oleh Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Dompu yaitu masing-masing sebesar 72,31 persen dan 67,86 persen. Adapun TPAK terendah dimiliki oleh Kabupaten Lombok Utara yaitu sebesar 59,95 persen.

Antara tahun 2011–2012, TPAK masing-masing kabupaten/kota menunjukkan perubahan yang cukup bervariasi. Sebagian kabupaten/kota mengalami peningkatan sedangkan sebagian yang lain mengalami penurunan. Kabupaten/kota yang mengalami kenaikan TPAK antara tahun 2011-2012 adalah Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Sumbawa, Bima dan Kota Bima sedangkan yang mengalami penurunan adalah Kabupaten Lombok Timur, Dompu, Sumbawa Barat, Lombok Utara dan Kota Mataram.

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) dapat didefinisikan sebagai proporsi penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat Kesempatan Kerja dapat memberikan gambaran mengenai seberapa besar penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja dapat terserap oleh lapangan pekerjaan yang tersedia. Dengan semakin terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia akan mengakibatkan peningkatan jumlah pengangguran.

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional Tahun 2011 – 2012, jumlah angkatan kerja yang terserap dalam lapangan pekerjaan yang tersedia di Provinsi Nusa Tenggara Barat relatif cukup besar. Pada tahun 2011 TKK Provinsi Nusa Tenggara Barat tercatat sebesar 94,67 persen dan pada tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 94,74 persen. Jika dirinci menurut kabupaten/kota, terlihat bahwa TKK tertinggi pada tahun 2011 dicapai oleh Kabupaten Lombok Timur yaitu sebesar 95,41 persen, sedangkan kabupaten/kota yang menunjukkan TKK paling rendah adalah Kota Mataram yaitu sebesar 93,30 persen. Pada tahun 2012 TKK masing-masing kabupaten/kota mengalami pergeseran. TKK tertinggi dicapai oleh Kabupaten Lombok Utara yaitu sebesar 96,62 persen dan kemudian diikuti Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Dompu dengan

TKK masing-masing sebesar 95,31 persen dan 95,25 persen. Adapun posisi terendah pada tahun 2012 tetap diduduki oleh Kota Mataram dengan TKK sebesar 93,47 persen. Secara umum pada tahun 2012, TKK kabupaten/kota cenderung mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2011, kecuali Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Timur yang sedikit mengalami penurunan. Penurunan TKK mengindikasikan peningkatan angka pengangguran. Oleh karena itu, penurunan di dua kabupaten tersebut, perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah, karena dengan terjadinya penurunan TKK akan menimbulkan permasalahan pengangguran yang cukup serius.

Tabel 5.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Kesempatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2011 - 2012

Kabupaten/Kota	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		Tingkat Kesempatan Kerja	
	2011	2012	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lombok Barat	66,08	66,09	95,11	94,70
Lombok Tengah	66,21	72,46	94,06	94,15
Lombok Timur	65,01	60,56	95,41	95,31
Sumbawa	68,37	72,31	94,83	95,03
Dompu	67,24	64,17	94,13	95,25
Bima	66,67	67,86	94,87	94,92
Sumbawa Barat	69,17	65,21	95,01	94,75
Lombok Utara	66,91	59,95	95,15	96,62
Kota Mataram	64,71	61,98	93,30	93,47
Kota Bima	64,84	67,77	93,64	93,64
NTB	66,12	66,02	94,67	94,74

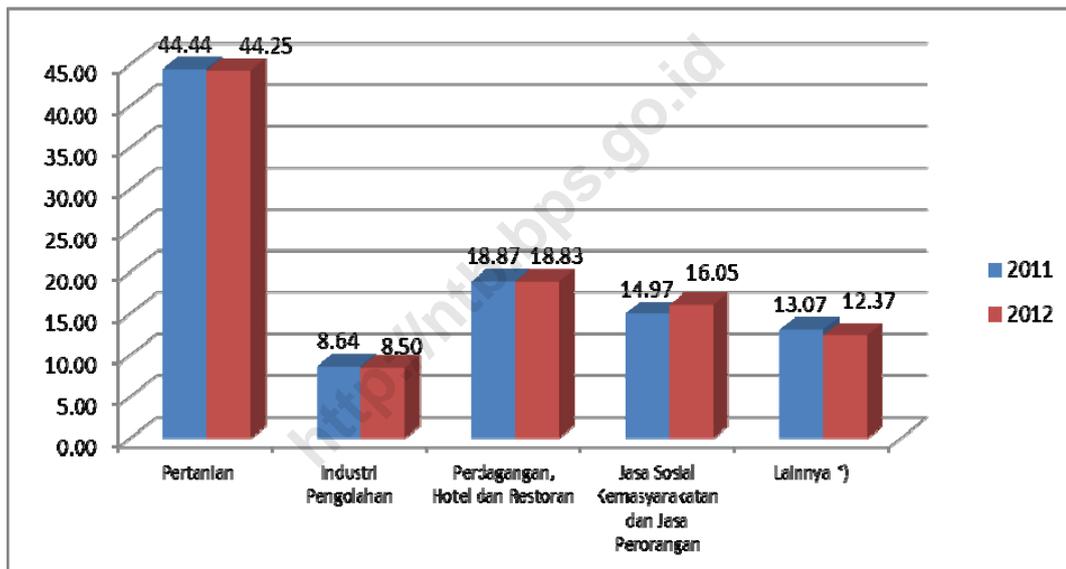
Sumber : Diolah dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

5.2. Lapangan Pekerjaan dan Status Pekerjaan

Potensi yang dimiliki oleh sektor perekonomian suatu daerah, dapat tercermin dari proporsi penduduk yang terserap dimasing-masing sektor perekonomian yang dapat digambarkan oleh lapangan pekerjaan tempat mereka bekerja.

Provinsi Nusa Tenggara Barat tergolong sebagai daerah agraris karena sektor pertanian masih merupakan lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja terbanyak. Dalam kurun waktu 2011 – 2012 terjadi pergeseran dalam penyerapan tenaga kerja untuk sektor pertanian, industri dan lainnya. Pada tahun 2011 sebanyak 44,44 persen penduduk 15 tahun ke atas bekerja di sektor pertanian menurun menjadi 44,25 persen pada tahun 2012. Untuk sektor industri, jumlah pekerjanya juga mengalami penurunan dari 8,64 persen pada tahun 2011 menjadi 8,50 persen pada tahun 2012. Penurunan juga terjadi pada sektor perdagangan dan lainnya dimana masing-masing berkurang 0,04 persen dan 0,70 persen. Adapun di sektor jasa, persentase pekerjanya menunjukkan peningkatan dari 14,97 persen pada tahun 2011 menjadi 16,05 persen pada tahun 2012.

Gambar 5.1. Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan, Tahun 2011 dan 2012



Sumber : Diolah dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Selain lapangan pekerjaan, status pekerjaan juga merupakan indikator yang dapat memberikan gambaran mengenai kedudukan pekerja. Status pekerjaan secara umum dapat dibedakan menjadi dua, yakni pekerja di sektor formal dan informal. Pada umumnya pekerja di sektor formal adalah mereka yang memiliki status berusaha dengan menggunakan buruh yang dibayar atau yang berstatus sebagai "buruh/karyawan". Sedangkan mereka yang berusaha sendiri, berusaha dengan buruh tidak dibayar dan pekerja keluarga merupakan pekerja yang tergolong bekerja di sektor informal.

Pada tahun 2012, persentase pekerja berdasarkan status pekerjaannya, secara umum tidak mengalami perubahan yang berarti jika dibandingkan dengan tahun 2011. Kondisi yang sama dengan tahun 2011, pada tahun 2012 di Provinsi Nusa Tenggara Barat pekerja yang berstatus berusaha dibantu buruh memiliki persentase terbesar yaitu 24,46 persen, kemudian diikuti oleh berusaha sendiri sebesar 18,72 persen dan pekerja bebas sebesar 18,64 persen.. Status pekerjaan yang persentasenya paling kecil adalah buruh/karyawan yaitu sebesar 17,05 persen. Untuk tahun 2012, pekerja yang berstatus berusaha dibantu buruh mengalami penurunan menjadi 24,46 persen, Untuk pekerja keluarga yang mengalami penurunan dari tahun 2011 menjadi 17,05 persen. Secara rinci status pekerjaan penduduk yang bekerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.2. Komposisi Penduduk 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan, Tahun 2011 dan 2012

Status Pekerjaan	2011	2012
(1)	(2)	(3)
Berusaha Sendiri	18,30	18,72
Berusaha Dibantu Buruh	26,49	24,46
Buruh/Karyawan	21,87	21,12
Pekerja Bebas	16,12	18,64
Pekerja Keluarga	17,23	17,05
Total	100,00	100,00

Sumber : Diolah dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

5,3, Jam Kerja

Untuk melihat tingkat produktifitas pekerja, salah satu indikator yang dapat digunakan adalah jumlah jam kerja selama seminggu yang lalu, Apabila sebagian besar pekerja di suatu daerah jumlah jam kerjanya kurang dari 35 jam dalam seminggu, dapat dikatakan bahwa tingkat produktivitas pekerja di daerah tersebut masih rendah atau belum maksimal, dan begitu pula sebaliknya,

Tabel 5,3, Komposisi Penduduk 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja dan Kabupaten/Kota, Tahun 2011 - 2012

Kabupaten/Kota	Jumlah Jam Kerja			
	Kurang dari 35 Jam		35 Jam Ke Atas	
	2011	2012	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lombok Barat	32,74	35,97	67,26	64,03
Lombok Tengah	52,66	57,59	47,34	42,41
Lombok Timur	52,29	52,79	47,71	47,21
Sumbawa	49,00	45,38	51,00	54,62
Dompu	52,10	46,54	47,90	53,46
Bima	59,47	47,40	40,53	52,60
Sumbawa Barat	58,29	41,32	41,71	58,68
Lombok Utara	55,87	57,60	44,13	42,40
Kota Mataram	23,36	19,94	76,64	80,06
Kota Bima	44,48	35,93	55,52	64,07
NTB	47,55	46,48	52,45	53,52

Sumber : Diolah dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Berdasarkan tabel 5.3, dapat dilihat bahwa tingkat produktifitas para pekerja di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2012 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2011, Hal ini ditunjukkan oleh semakin menurunnya jumlah pekerja yang bekerja dengan jumlah jam kerja kurang dari 35 jam perminggu, Pada tahun 2011 jumlah pekerja yang menggunakan jam kerja kurang dari 35 jam seminggu sebanyak 47,55 persen, menurun pada tahun 2012 menjadi 46,48 persen, Hal lain yang dapat dilihat dari tabel 5,3 adalah secara umum seluruh kabupaten/kota mengalami penurunan produktifitas pada tahun 2012 kecuali Kabupaten Lombok Barat, Lombok tengah, Lombok Timru dan Kabupaten Lombok Utara.

BAB VI

KEMISKINAN

Mengapa mengukur kemiskinan?, Menurut Ravallion (1998), bahwa “pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen yang tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin”, Data kemiskinan dapat memberikan informasi bagi kebijakan-kebijakan yang ditujukan untuk menurunkan tingkat kemiskinan, Menghitung jumlah penduduk miskin sangat penting untuk membantu pembuat keputusan mendesain program dan kebijakan untuk memerangi kemiskinan,

Dengan data tentang status kemiskinan penduduk, daerah dapat mengevaluasi dampak dari program-program pembangunan terhadap penduduk miskin, Ketepatan sasaran program pembangunan khususnya program anti kemiskinan sangat menentukan keberhasilan pembangunan, yang ditunjukkan dengan menurunnya penduduk miskin,

Memahami karakteristik kemiskinan dapat membantu pembuat kebijakan berpikir tentang dampak dari strategi pertumbuhan, Sebagai contoh, dengan mengukur kemiskinan setiap waktu, maka dapat mengetahui apakah kemiskinan meningkat atau menurun, atau pembangunan yang sudah berjalan dapat membantu orang miskin, Pembangunan pelayanan publik yang dibangun apakah dapat dinikmati oleh lapisan masyarakat menengah bawah, Selain itu, subsidi-subsidi yang diberlakukan oleh pemerintah apakah sudah tepat sasaran,

Pembangunan nasional pada hakekatnya untuk mencapai masyarakat Indonesia yang sejahtera, bebas dari kebodohan dan kemiskinan, Pada pemerintahan terdahulu, pembangunan yang dilaksanakan telah berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, Hal itu, terbukti dengan terciptanya sarana dan prasarana fisik yang memadai dan pendapatan per kapita masyarakat yang terus meningkat setiap tahun, Namun disisi lain, mengabaikan aspek pemerataan baik antar daerah maupun antar kelompok di dalam masyarakat, Akibatnya terjadi ketimpangan sosial yang bermuara pada terjadinya proses reformasi, Menyadari kondisi sosial tersebut sebagai akibat pembangunan masa lalu, pemerintahan saat ini terus berupaya keras untuk mencanangkan dan melaksanakan kebijakan yang ditujukan pada peningkatan kesejahteraan kelompok masyarakat miskin dan mengedepankan aspek pemerataan tanpa mengganggu stabilitas nasional,

Salah satu indikator sosial ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, adalah *kemiskinan*, Berkurangnya jumlah penduduk miskin dapat

diartikan bahwa pendapatan penduduk semakin meningkat, Hal ini dapat dipahami, karena secara konseptual, penduduk miskin adalah penduduk yang pendapatannya lebih kecil dari pendapatan yang dibutuhkan untuk hidup secara layak, Aspek penting lain yang perlu diperhatikan berkenaan dengan peningkatan pendapatan penduduk adalah *aspek pemerataan*, yaitu bagaimana peningkatan pendapatan penduduk tersebut terdistribusi secara merata diantara kelompok-kelompok masyarakat,

6,1, Persentase Penduduk Miskin (*Headcount Index/P₀*)

Sejauh ini ukuran yang paling umum digunakan adalah persentase penduduk miskin (*Headcount Index/P₀*), yang secara sederhana mengukur proporsi penduduk yang dikategorikan sebagai penduduk miskin, Keuntungan yang didapat dari ukuran ini adalah bahwa ukuran tersebut mudah dihitung dan mudah dipahami

Meskipun demikian, persentase penduduk miskin (*Headcount Index/P₀*) memiliki paling tidak 3 (tiga) kelemahan, yaitu :

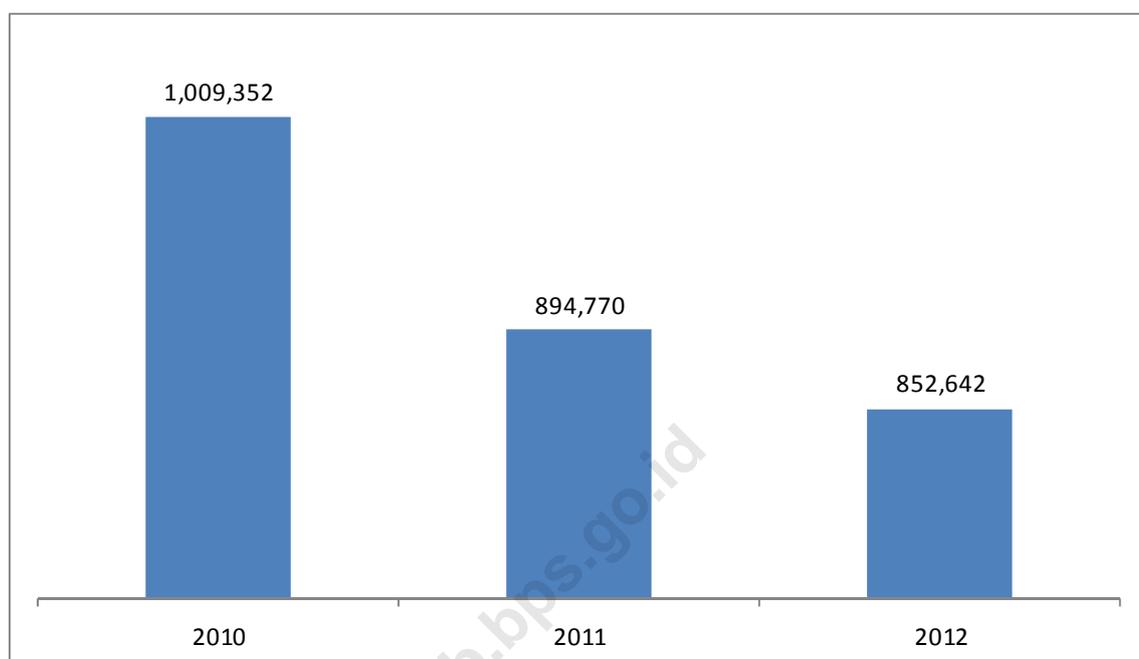
- Persentase penduduk miskin (*Headcount Index/P₀*) tidak memperhitungkan intensitas kemiskinan diantara penduduk miskin,
- Persentase penduduk miskin (*Headcount Index/P₀*) tidak mengindikasikan seberapa miskin penduduk miskin tersebut atau seberapa parah kemiskinan penduduk miskin yang terjadi,
- Persentase penduduk miskin (*Headcount Index/P₀*) hanya memberikan informasi secara agregat saja, sehingga masih memerlukan informasi-informasi kemiskinan lainnya,

Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat dari tahun 2010 – 2012 terus mengalami penurunan, Pada tahun 2010, jumlah penduduk miskin mencapai sebanyak 1,009,352 orang, berkurang pada tahun 2011 menjadi 894,770 orang dan berkurang lagi menjadi 852,642 orang,

Untuk lebih jelasnya keadaan jumlah dan persentase penduduk miskin Nusa Tenggara Barat Periode waktu 2010 – 2012 dapat dilihat seperti tabel 4,1, Di mana terlihat perkembangan penduduk kemiskinan Nusa Tenggara barat dalam tiga tahun terakhir terus mengalami penurunan, Pada tahun 2010, persentase penduduk miskin mencapai sebesar 21,55 persen, menurun menjadi 19,73 persen tahun 2011 dan menurun lagi menjadi 18,63 persen tahun 2012, Dengan menurunnya jumlah dan persentase penduduk miskin ini berarti pembangunan ekonomi di Nusa Tenggara Barat memberikan dampak yang positif kepada

masyarakat menengah bawah, Terangkatnya pendapatan masyarakat menengah bawah memberikan dorongan untuk dapat keluar dari kemiskinan,

Grafik 5,1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010-2012

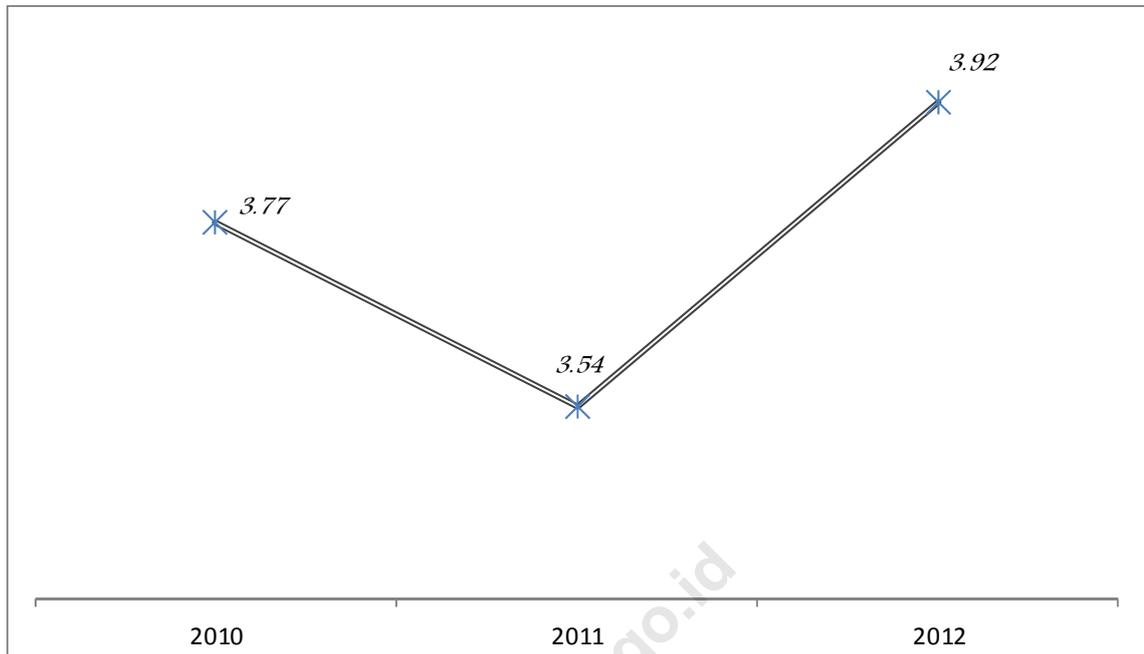


6,2, Indeks Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2010 – 2012

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar mengetahui berapa jumlah atau persentase penduduk miskin, Dimensi lain yang sangat penting dan harus diperhatikan adalah tingkat kedalaman dari kemiskinan (P_1), Kebijakan kemiskinan tidak hanya memperkecil jumlah penduduk miskin saja, tetapi juga harus bisa mengurangi tingkat kedalaman kemiskinan (P_1) atau meningkatkan pendapatan penduduk miskin,

Tingkat kedalaman kemiskinan yang digambarkan oleh angka Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) menunjukkan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis/batas kemiskinan, Di mana semakin tinggi nilai indeks kedalaman maka semakin lebar kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, atau dengan kata lain semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan kehidupan ekonomi penduduk miskin semakin terpuruk,

Grafik 5,2 Indeks Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010-2012



Indeks kedalaman kemiskinan Nusa Tenggara Barat ditunjukkan pada grafik 4,2, Terlihat indeks kedalaman kemiskinan di Nusa Tenggara Barat pada tahun 2010 sebesar 3,77, Angka tersebut menunjukkan bahwa keadaan ekonomi antar penduduk miskin Nusa Tenggara Barat tahun 2010 terjadi kesenjangan pengeluaran penduduk miskin, Artinya ada beberapa penduduk yang pendapatannya mendekati garis kemiskinan dan ada juga beberapa penduduk miskin yang pendapatannya relatif lebar dengan batas/garis kemiskinan, Pada keadaan tahun 2011, kondisi indek kedalaman kemiskinan Kota Mataram mengalami Penurunan menjadi 3,34, Ini berarti kesenjangan ekonomi diantara penduduk miskin semakin mengecil, Keadaan ekonomi penduduk miskin Nusa Tenggara Barat mengalami peningkatan atau mendekati garis kemiskinan, Untuk tahun 2012, indeks kedalaman kemiskinan Nusa Tenggara Barat mengalami kenaikan menjadi sebesar 3,92, Dengan naiknya indeks kedalaman kemiskinan tahun 2012 menunjukkan bahwa ekonomi rumahtangga miskin sangat labil ketika ada hambatan dari dalam rumahtangga maupun dari luar, seperti naiknya harga kebutuhan rumahtangga,

Dari gambaran di atas berarti peningkatan ekonomi bagi penduduk miskin bersifat fluktuatif di Nusa Tenggara Barat, Untuk menjaga stabilitas ekonomi rumahtangga miskin

sangat diperlukan program perlindungan sosial yang tepat sasaran dan program lainnya yang pro kemiskinan,

Selain itu, maksud dari indeks kedalaman kemiskinan ini dapat juga diinterpretasikan sebagai besarnya biaya untuk mengentaskan kemiskinan (relatif terhadap garis kemiskinan), karena ukuran tersebut menunjukkan berapa banyak uang yang akan harus ditransfer kepada penduduk miskin untuk membawa pengeluaran/pendapatan mereka mencapai garis kemiskinan (dalam mengentaskan mereka dari kemiskinan), Biaya minimum untuk mengentaskan kemiskinan dengan menggunakan transfer pada target/sasaran secara sederhana merupakan jumlah dari besarnya kedalaman kemiskinan (*poverty gap*) dalam suatu penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, Setiap penduduk miskin akan ditransfer sejumlah uang tertentu (*lumpsum transfer*) untuk mencapai garis kemiskinan, Interpretasi ini hal yang sulit dilakukan oleh pemerintah daerah, karena biaya untuk mentransfer sejumlah uang kepada semua penduduk miskin menelan biaya yang sangat banyak sekali, Walaupun ada daerah yang melakukan transfer tersebut, tidak membuat penduduk miskin keluar dari kemiskinan secara permanen, Untuk itu, pengentasan dengan cara mentransfer sejumlah uang tunai sangat mahal dan dapat menjadikan penduduk miskin malas, Salah satu cara yang tepat adalah pemberdayaan penduduk miskin, Penduduk miskin perlu kita tingkatkan kapasitasnya dan memberikan kesempatan mengambil peluang yang ada guna memperbaiki ekonomi rumahtangganya,

Negara kita pernah melakukan dana transfer kepada penduduk miskin, yaitu tahun 2005 dan 2008 yang dikenal dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT), Namun BLT tersebut tidak untuk mengentaskan kemiskinan tetapi hanya bersifat membantu penduduk miskin tidak bertambah terpuruk kemiskinannya dengan adanya kebijakan pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), Jadi, BLT bukan program pengentasan kemiskinan lebih tepatnya merupakan jaminan sosial dari pemerintah agar penduduk miskin tidak bertambah terpuruk dan penduduk yang rentan miskin tidak jatuh ke dalam jurang kemiskinan,

Walaupun demikian, angka indeks kedalaman kemiskinan tersebut mempunyai arti bagi para pembuat kebijakan, antara lain :

- Mengetahui biaya minimum (tabungan potensial) pengentasan kemiskinan di daerah,
- Pengentasan kemiskinan membutuhkan biaya yang cukup besar
- Menyusun program pengentasan harus yang tepat sasaran
- Penduduk miskin keluar dari kemiskinan tidak hanya membutuhkan dana transfer saja, namun perlu membuat secara permanen/mandiri dapat keluar dari kemiskinan,

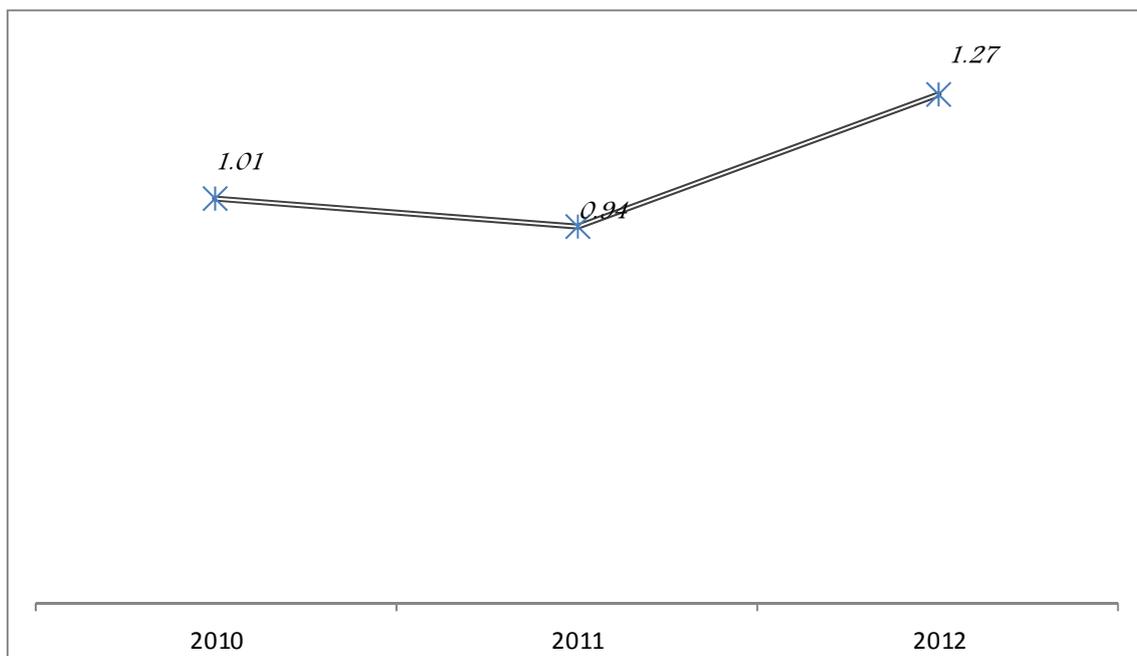
6,3, Indeks Kearifan Kemiskinan di Nusa Tenggara Barat, 2010 – 2012

Selain indeks kedalaman kemiskinan, yang sangat perlu dilihat dan dianalisis adalah indeks keparahan kemiskinan, angka Indeks Kearifan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin itu sendiri, dan dapat juga digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan, Semakin tinggi angka indeks keparahan kemiskinan maka sebaran pengeluaran diantara penduduk miskin itu semakin timpang dan sebaliknya,

Untuk itu, persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin saja, Dimensi penyebaran pengeluaran/pendapatan dari penduduk miskin sangat perlu dilihat, Penyusunan kebijakan penanggulangan kemiskinan sangat memerlukan angka indeks keparahan kemiskinan ini, Sentuhan kebijakan pembangunan penanggulangan kemiskinan tentunya berbeda antara daerah yang mempunyai indeks keparahan cukup tinggi dengan daerah yang mempunyai indeks keparahan kemiskinan rendah, karena penyebaran (konsentrasi) penduduk miskin berbeda,

Gambaran indeks keparahan Kemiskinan di Nusa Tenggara Barat periode tahun 2010 – 2012 ditunjukkan seperti grafik 4,3, Indeks keparahan kemiskinan pada tahun 2010 hanya sebesar mencapai 1,01 dan mengalami penurunan pada tahun 2011, yaitu menjadi 0,94 dan mengalami kenaikan sebesar 1,27, Dengan naiknya angka indeks keparahan kemiskinan ini maka sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin semakin menyebar atau diantara penduduk miskin pengeluarannya semakin timpang, Kondisi ini berpengaruh kepada penyusunan program pembangunan yang pro kemiskinan,

Grafik 4,3 Indeks Kearifan Kemiskinan di Nusa Tenggara Barat Tahun 2010-2012



<http://ntb.bps.go.id>

VII, PERUMAHAN

Kebutuhan akan rumah atau tempat tinggal adalah merupakan kebutuhan primer dalam kehidupan manusia, selain kebutuhan akan sandang dan pangan, Sebagai salah satu kebutuhan kehidupan manusia rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlindung,

tetapi rumah sudah menjadi bagian dari gaya hidup dan simbol status sosial bahkan juga menunjukkan identitas pemiliknya,

Melihat fungsi dan peran rumah yang sangat penting tersebut, masyarakat berusaha menciptakan tempat tinggalnya yang memadai, yang memiliki persyaratan untuk dihuni secara layak, baik dari segi kenyamanan, keamanan dan kesehatan bagi penghuninya,

Namun melihat berbagai macam tingkat kesejahteraan masyarakat yang dapat diukur dari pendapatan yang diterima, maka berbagai macam pula kualitas perumahan atau tempat tinggal dari masyarakat itu sendiri,

Terbatasnya lahan untuk pemukiman dan tingginya permintaan tempat tinggal yang layak huni menyebabkan harga rumah menjadi sangat tinggi sehingga hanya dapat dijangkau oleh sebagian kecil masyarakat, Akibatnya banyak rumah tangga yang terpaksa menempati rumah yang kurang layak huni baik dilihat dari segi kesehatan, kenyamanan maupun keamanan bagi penghuninya, Konsekwensi lain dari tingginya biaya pembangunan rumah adalah masih banyaknya rumahtangga yang tinggal dan hidup dengan penguasaan tempat tinggal dengan cara menyewa/kontrak, numpang pada saudara/famili, tinggal dirumah dinas atau lainnya,

7,1, Status Penguasaan Tempat Tinggal

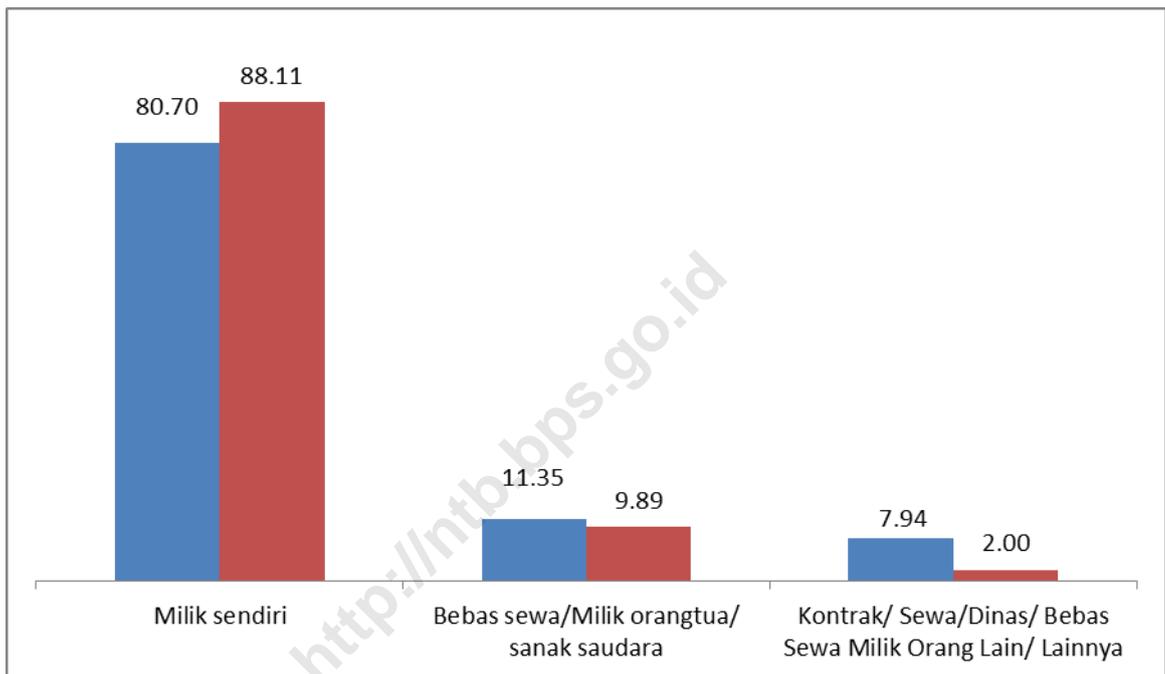
Status penguasaan tempat tinggal bagi rumahtangga sangatlah penting, Kenyamanan dalam kelangsungan hidup rumahtangga akan lebih terjamin dan tenang apabila tempat tinggal itu sudah menjadi milik sendiri, Tempat tinggal merupakan tempat menjalin kasih sayang sesama anggota keluarga dan membina rumahtangga yang bahagia, Apabila penguasaan tempat tinggal secara hukum atau secara fakta sudah menjadi milik sendiri, maka terasa aman untuk membina rumahtangga,

Hasil Susenas 2012 menunjukkan status penguasaan tempat tinggal menurut daerah perkotaan dan pedesaan, Terlihat pada tabel 7,1 bahwa untuk status tempat tinggal milik sendiri di daerah pedesaan lebih banyak dibandingkan dengan daerah perkotaan,, Untuk status tempat tinggal milik sendiri daerah perkotaan sebanyak 88,11 persen, sementara itu daerah perkotaan hanya sebanyak 80,70 persen,

Melihat persentase tersebut, maka masih cukup banyak rumahtangga di perkotaan yang menempati tempat tinggal bukan milik sendiri, Kondisi ini dapat dimaklumi karena

kebutuhan tempat tinggal diperkotaan lebih mahal dibandingkan dengan daerah pedesaan, khususnya lahan untuk tempat tinggal di perkotaan, Selain itu, daerah perkotaan juga banyak urbanisasi baik itu bertujuan sekolah maupun awal bekerja sehingga punya rumah sendiri belum menjadi prioritas, Namun, dengan adanya pembangunan perumahan (BTN) sekiranya dapat membantu masyarakat untuk memiliki rumah dengan cara cicilan,

Gambar 7,1, Persentase Rumahtangga menurut Status Penguasaan Tempat Tinggal dan Type Daerah Tahun 2012



Sumber : Diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

7,2, Kualitas Tempat Tinggal

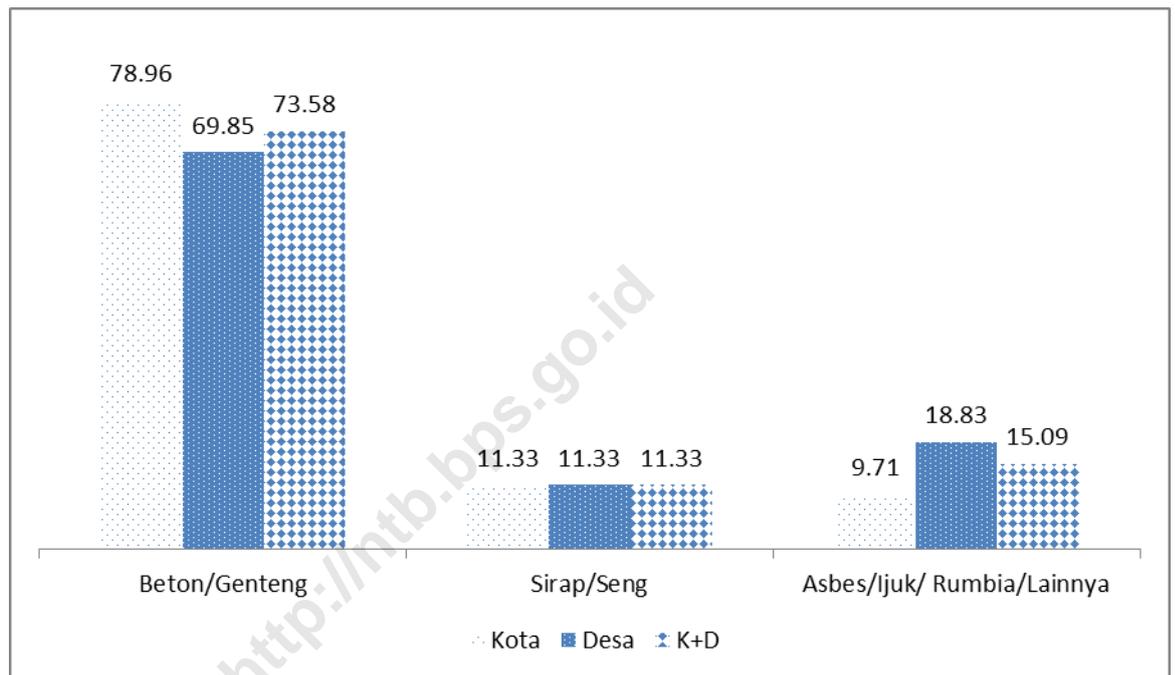
Rumah dikatakan layak sebagai bangunan tempat tinggal adalah jika rumah tersebut sudah memiliki lantai dinding dan atap, Namun kualitas ketiga unsur tersebut dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan penghuninya,

Secara umum kualitas tempat tinggal sangat ditentukan oleh kualitas bahan bangunan yang digunakan, Kualitas dari sebuah tempat tinggal dapat dilihat dari jenis lantai, luas lantai hunian perorang, jenis dinding dan juga jenis atap yang digunakan,

Gambar 7,2 menggambarkan bahwa sebagian besar tempat tinggal beratapkan beton/genteng, Sementara itu, atap yang digunakan tempat tinggal antara perkotaan

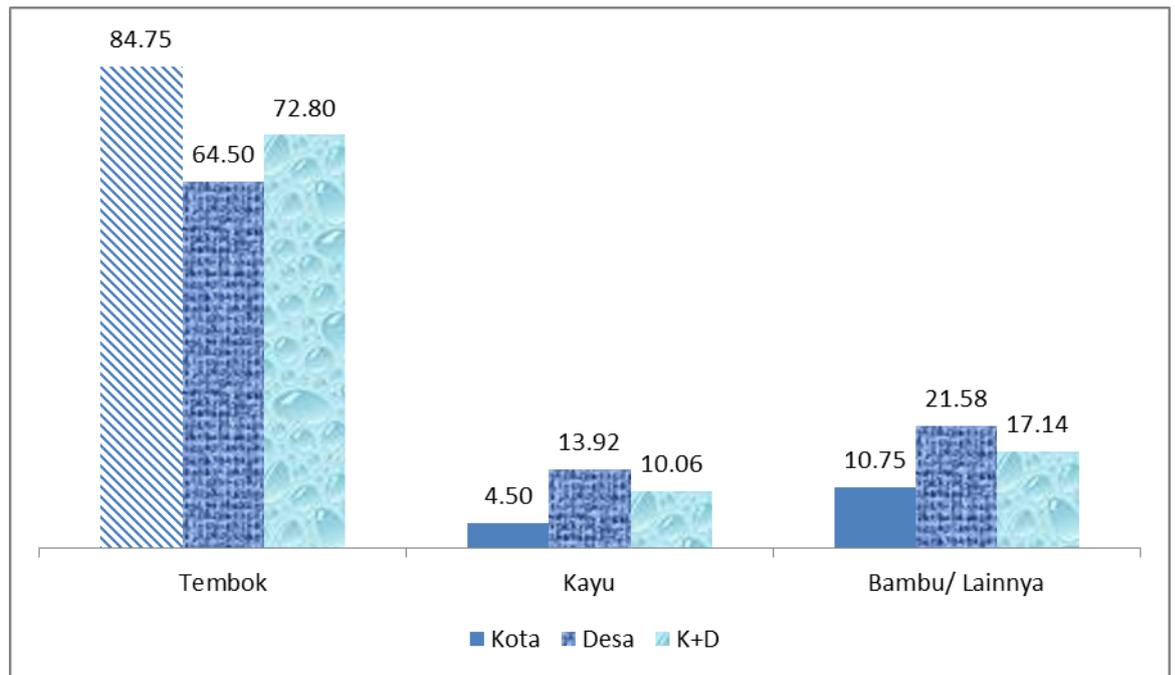
dengan pedesaan terlihat nyata, Di perkotaan, tempat tinggal beratapkan beton/genteng sebanyak 78,96 persen, sedangkan di pedesaan hanya sebanyak 69,85 persen, Sementara itu, tempat tinggal beratapkan asbes/ijuk/rumbia/lainnya di pedesaan mencapai 18,83 persen dan perkotaan hanya sebanyak 9,71 persen,

Gambar 7,2 : Persentase Rumahtangga Menurut Jenis Atap Terluas dan Type Daerah di NTB Tahun 2012



Selain atap, jenis dinding menentukan kualitas tempat tinggal, Jenis dinding tempat tinggal yang berkualitas adalah berjenis tembok, kemudian kayu dan kualitas rendah berbahan bambu, Hasil Susenas tahun 2012, tempat tinggal yang berdindingkan tembok mencapai 72,80 persen, Untuk karakteristik ini daerah perkotaan sudah mencapai 84,75 persen dan pedesaan hanya sebanyak 64,50 persen, Tempat tinggal berdindingkan kayu dan bambu/lainnya untuk pedesaan lebih banyak dibandingkan perkotaan,

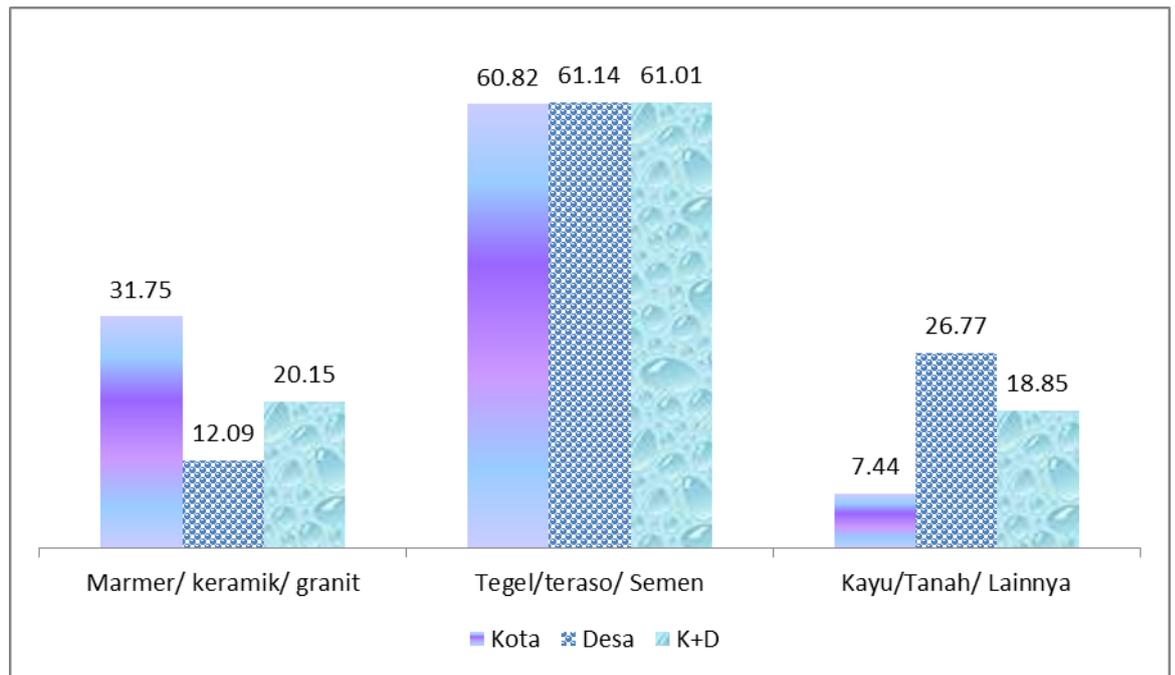
Gambar 7,3 : Persentase Rumahtangga Menurut Jenis Dinding Terluas dan Type Daerah di NTB Tahun 2012



Karakteristik tempat tinggal yang tidak kalah pentingnya adalah jenis lantai terluas yang ditempati, Jenis lantai ini dapat menjadi derajat kesehatan masyarakat, Kualitas kesehatan untuk tempat tinggal berlantai tanah dapat dikatakan rendah, karena kebersihan tidak terjamin, Tentunya ini mempengaruhi kualitas kesehatan penghuninya,

Gambar 4 memperlihatkan bahwa sebagian besar tempat tinggal di Nusa Tenggara Barat berlantai tegel/teraso/semen sekitar 60 persen, baik perkotaan maupun pedesaan, Sedangkan tempat tinggal berlantai marmer/keramik/granit di perkotaan mencapai sebanyak 31,75 persen dan pedesaan hanya sebanyak 12,09 persen, Sementara itu, tempat tinggal berlantai tanah/kayu/lainnya diperkotaan hanya 7,44 persen dan di pedesaan mencapai sebanyak 26,77 persen, Mengingat di pedesaan masih banyak tempat tinggal yang berlantai tanah, maka pemerintah daerah memperhatikan kondisi ini, Kebijakan lantainisasi masih perlu dijalankan di Nusa Tenggara Barat, Perhatian ini tidak hanya kualitas tempat tinggal secara fisik tempat tinggal, tetapi perhatian pemerintah terhadap kualitas kesehatan masyarakat,

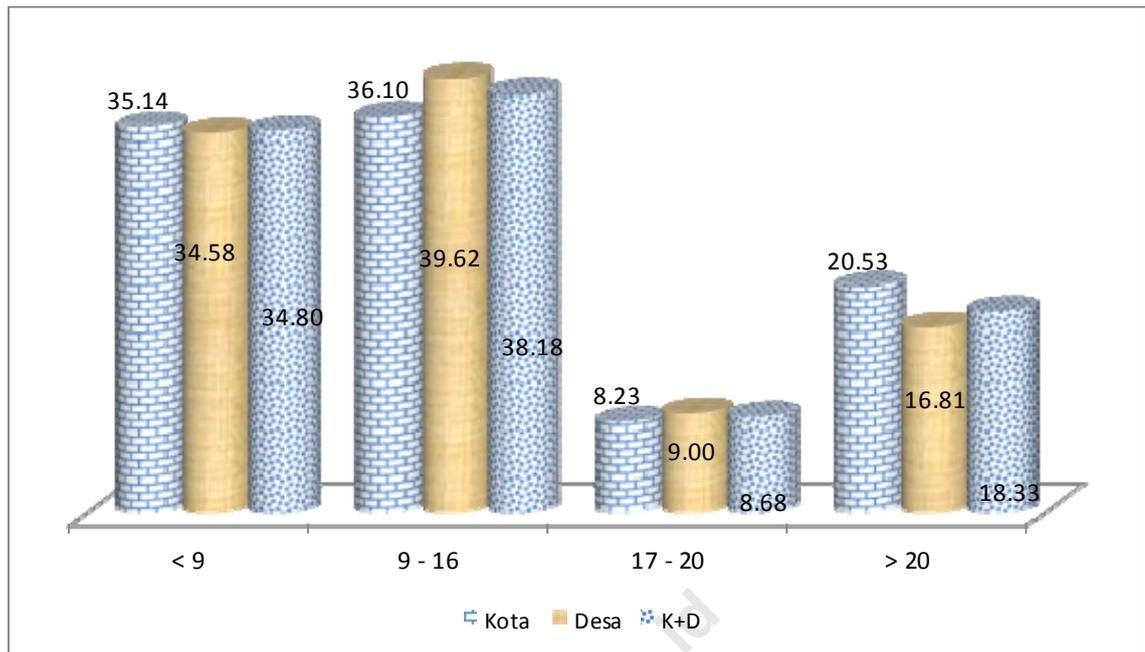
Gambar 7,4 : Persentase Rumahtangga Menurut Jenis Lantai Terluas dan Type Daerah di NTB Tahun 2012



Luas lantai hunian per orang tempat tinggal merupakan salah satu kualitas tempat tinggal, Semakin luas hunian tempat tinggal semakin nyaman bagi penghuninya, Dilihat dari sisi kesehatan, luas hunian tempat tinggal membuat sirkulasi udara tempat tinggal cukup baik dan berpengaruh bagi kesehatan penghuninya,

Luas Lantai hunian per orang lebih kecil 9 M2/orang di Nusa Tenggara Barat mencapai sebanyak 34,80 persen, Apabila dirinci menurut perkotaan dengan pedesaan persentasenya tidak berbeda secara nyata, Yang berbeda nyata adalah tempat tinggal dengan luas hunian 9 - 16 m2/orang dan > 20 m2/orang, Untuk tempat tinggal dengan luas hunian 9 – 16 m2/orang di pedesaan sebanyak 39,62 persen dan perkotaan hanya sebanyak 36,10 persen, Sementara itu, tempat tinggal dengan luas hunian > 20 m2/orang untuk perkotaan lebih banyak dibandingkan di pedesaan, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 7,5,

Gambar 7,5, Persentase Rumah Tangga menurut Luas Lantai Perorang (m2) dan Type Daerah Tahun 2012



Sumber : Diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

7,3, Fasilitas Tempat Tinggal

Kelengkapan fasilitas pokok suatu rumah tempat tinggal akan menentukan nyaman atau tidaknya rumah tinggal tersebut, yang juga menentukan kualitasnya, Fasilitas pokok yang penting agar suatu rumah menjadi nyaman dan sehat untuk ditinggali adalah tersedianya air bersih serta jamban yang dimiliki sendiri,

Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari, Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan oleh pemerintah,

Tabel 7,1 Persentase Rumahtangga Menurut Sumber Air Minum dan Type Daerah di Nusa Tenggara Barat Tahun 2012

Sumber Air Minum	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan+Pedesaan
Air kemasan bermerk	11,03	2,25	5,85
Air isi ulang	11,98	3,87	7,19
Leding meteran	15,69	5,56	9,71
Leding eceran	2,33	2,24	2,28
Sumur bor/pompa	7,64	11,58	9,96
Sumur terlindung	38,77	41,96	40,65
Sumur tak terlindung	3,91	7,43	5,99
Mata air terlindung	7,60	21,54	15,82
Mata air tak terlindung	0,72	2,31	1,66
Air sungai	0,24	1,27	0,85
Lainnya	0,08		0,03
Jumlah	100,00	100,00	100,00

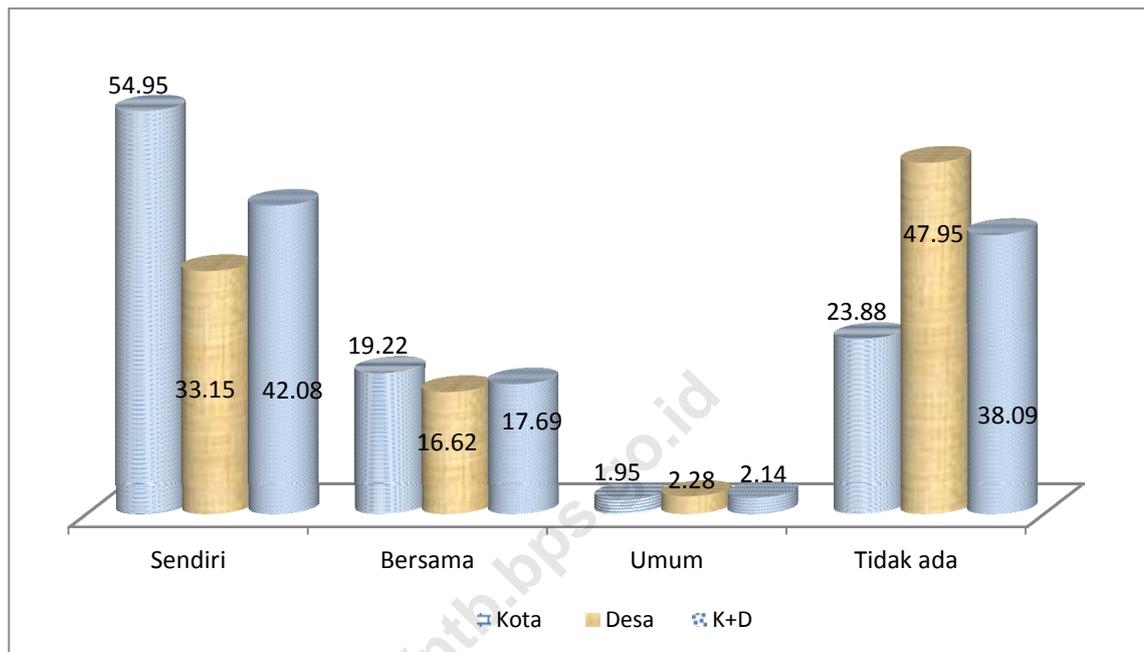
Hasil Susenas tahun 2012 menunjukkan paling banyak sumber air minum yang dimanfaatkan oleh rumahtangga adalah sumur terlindung, untuk perkotaan sebanyak 38,77 persen dan pedesaan 41,96 persen, Sementara itu, ada perbedaan yang menyolok sumber air minum yang dimanfaatkan oleh rumahtangga antara perkotaan dengan pedesaan, Seperti ; Air kemasan/isi ulang untuk daerah perkotaan mencapai 23,01 persen, sedangkan untuk daerah pedesaan hanya sebanyak 6,12 persen, Untuk ledeng juga demikian, masih sedikit rumahtangga di pedesaan yang dapat mengakses sumber air minum tersebut,

Fasilitas tempat tinggal yang menentukan salah satu indikator derajat kesehatan masyarakat adalah kepemilikan fasilitas jamban, Tempat buang air besar sembarangan tentunya membawa dampak yang tidak baik bagi masyarakat, Dengan adanya tempat buang air besar di rumahtangga, maka mencerminkan derajat kesehatan rumahtangga tersebut,

Gambar 7,6 menunjukkan bahwa rumahtangga yang mempunyai jamban sendiri di Nusa Tenggara Barat baru mencapai 42,08 persen, untuk perkotaan sebanyak 54,95 persen dan pedesaan hanya sebanyak 33,15 persen, Bahkan dalam gambar 7,6

memperlihatkan dengan jelas bahwa sebanyak 38,09 persen rumahtangga di Nusa Tenggara Barat tidak mempunyai fasilitas tempat buang air besar alias buang air besar sembarangan, seperti di sawah, kebun, sungai dan sejenisnya, Ini menjadi perhatian pemerintah daerah untuk melakukan program pembangunan terkait hal tersebut,

Gambar 7,6, Persentase Rumah Tangga menurut Kepemilikan fasilitas Tempat Buang Air Besar dan Type Daerah Tahun 2012 (Susenas 2012)



Fasilitas rumahtangga yang lain tidak kalah pentingnya adalah sumber penerangan, Selain fasilitas ini memberi kenyamanan bertempat tinggal, juga memberikan kualitas kesehatan penghuninya, Pemerintah berharap rumahtangga yang sudah mengakses sumber penerangan listrik, Namun Susenas 2012 menunjukkan bahwa rumahtangga yang sudah berlistrik mencapai sebanyak 94,80 persen, Ini berarti masih sekitar 5,20 persen rumahtangga yang menggunakan sumber penerangan dari petromak/aladin/pelita/sentir, Untuk rumahtangga yang relatif sedikit belum berpenerangan listrik perlu diketahui keberadaannya, Apakah posisi rumahtangga itu terletak pada wilayah yang terpencil sehingga sarana belum terbangun atau rumahtangga tersebut tidak mampu untuk mengakses fasilitas listrik yang telah dibangun,

Tabel 7,2, Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Penerangan dan Type Daerah Tahun 2012

Sumber Penerangan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
-------------------	-----------	-----------	-----------------------

(1)	(2)	(3)	(4)
Listrik PLN	98,6	88,0	92,4
Listrik non PLN	,3	3,9	2,4
Petromak/aladin	,5	1,2	,9
Pelita/sentir/obor	,5	6,6	4,1
Lainnya	,1	,3	,2
Jumlah	100,0	100,0	100,0

Sumber : Diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

<http://ntb.bps.go.id>

<http://ntb.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<http://ntb.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jl. Gunung Rinjani No. 2 Mataram NTB 83125
Telpon : (0370) 621385 Fax : (0370) 623801
E-mail : bps5200@bps.go.id Website : <http://ntb.bps.go.id>